

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2
NO. 08/MK-KUPI-2/XI/2022
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI PEMOTONGAN
DAN PELUKAAN GENITALIA PEREMPUAN (P2GP)
YANG MEMBAHAYAKAN TANPA ALASAN MEDIS**

1. *TASHAWWUR* (DESKRIPSI)

Organ kelamin laki-laki dan perempuan memiliki struktur anatomi dan fungsi yang berbeda. Perempuan mengalami menstruasi mingguan dengan dampak sakit (*adzâ*), hamil kurang lebih sembilan bulan, melahirkan jam-jaman atau harian, nifas mingguan atau bulanan, menyusui bayi selama 2 (dua) tahun, yang dampaknya adalah melelahkan (*kurhan*), sakit dan lelah berlipat-lipat berturut-berturut dan berulang-ulang (*wahnan alâ wahnin*). Dampak sakit (*adzâ*, *kurhan* bahkan *wahnan alâ wahnin*) selama menjalankan peran reproduksi khas perempuan ini bisa terjadi saat organ kelamin perempuan masih dalam kondisi sempurna. Sementara laki-laki hanya mengeluarkan sperma dalam durasi menitan dan berdampak nikmat. Perbedaan fungsi reproduksi di atas menyebabkan perbedaan signifikan tindakan pemotongan dan/atau pelukaan organ kelamin keduanya. Pada laki-laki, tindakan pemotongan kulup laki-laki melancarkan fungsi reproduksinya. Sebaliknya pada perempuan, tindakan yang sama dapat memberikan dampak buruk bahkan bahaya.

Tindakan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis alasan medis, terutama pada klitoris, dapat merusak banyak jaringan syaraf dan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan komplikasi segera dan komplikasi jangka panjang (Fadli, 2020). Komplikasi segera bisa muncul dalam bentuk nyeri hebat, pendarahan hebat, pembengkakan pada jaringan genitalia, demam, infeksi, masalah berkemih, masalah penyembuhan luka, perlukaan jaringan sekitar genitalia, syok hingga kematian. Komplikasi jangka panjang bisa muncul dalam bentuk kerusakan jaringan genitalia (nyeri kronis pada klitoris dan vulva), infeksi kronis organ genitalia, masalah sistem reproduksi (infeksi nyeri panggul kronis), masalah berkemih (nyeri berkemih, infeksi saluran kemih berulang), masalah vagina (gatal, keputihan, bakterial vaginosis, dan infeksi lain), jaringan parut dan keloid, masalah seksual (nyeri, berkurangnya kepuasan seksual), peningkatan risiko bayi lahir dengan komplikasi (kelahiran

sulit, pendarahan berlebih), hingga kematian bayi, perlunya operasi berulang (terutama praktik infibulasi), masalah psikologis (depresi, *anxietas*, *post traumatic stress disorder*, dll) (Mulati, 2019).

Tindakan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis hingga kini masih terus terjadi. Padahal praktik ini, dengan fungsi reproduksi perempuan sebagaimana digambarkan di atas, berpotensi besar untuk menambah sakit dan/atau lelah berlipat-lipat tersebut, sedangkan upaya perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis masih mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, bahaya yang muncul pasca-pemotongan dan/atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tidak dapat dibiarkan terus terjadi sampai jatuh korban lebih banyak.

P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis bisa ditemukan dalam tindakan-tindakan yang berlatar belakang *fashion*, seperti tindik dan tato (KPPPA, 2019), dan juga tindakan-tindakan yang berlatar belakang tafsir keagamaan, budaya, maupun gabungan keduanya. Di Indonesia, praktik budaya yang rentan mengandung P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis, di antaranya adalah *nyepitan* atau *capitan* (Banten), *suci* (Lombok Barat), *mandi lemon* atau *mencubit* atau *cubit kodok* (Gorontalo), *mansunna* (Sulawesi Barat), *basunat* atau *besunat* (Dumai, Kalimantan Selatan), *rasulan* (Indramayu), *makkatte'* (Bugis) atau *kattang* (Makassar), *sunat* (Jawa Barat, Jambi, Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur) (Komnas Perempuan dan PSKK UGM, 2017). Praktik sunat dan khitan perempuan juga rentan mengandung unsur P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis.

Seorang ibu menceritakan pengalamannya dikhitan saat berusia 7 tahun di Kalimantan dengan sembilu (sebilah bambu tipis) hingga mengalami pendarahan. Sakit luar biasa yang dialaminya menyebabkan trauma psikis. Hingga kini, ia tidak bisa menggunakan perabot rumah

dan apa pun dari bambu (Halaqah *Online* "Pemotongan & Pelukaan Genitalia Perempuan dalam Tinjauan Teologi dan Budaya", Alimat, 14 November 2020). Di Dumai Riau, seorang bidan yang disunat saat kecil mengalami trauma fisik berat. Ia ketakutan ketika diajak hubungan seksual oleh suami karena selalu merasakan nyeri sehingga tidak pernah merasakan kenikmatan seksual (Komnas Perempuan dan PSKK UGM, 2017). Di Lebak Banten, pada tahun 2008 bayi perempuan berusia 1 tahun disunat oleh dukun bayi (paraji). Ia pun mengalami pendarahan hebat di bagian klitorisnya dan segera dibawa ke bidan praktik yang ternyata tidak mampu mengatasinya sehingga dibawa ke Puskesmas. Bayi, akhirnya meninggal keesokan harinya (Komnas Perempuan, 2017 dan Siti Fauziah, 2017). Hady Maulanza Sp. OG., seorang ahli kandungan asal Aceh yang buka praktik di Jawa, memberikan kesaksian tentang adanya seorang pasien dengan keluhan tidak bisa melakukan hubungan seksual. Setelah diperiksa ternyata kondisi kelamin pasien tertutup di mana bagian labia (bibir kelamin) dijahit dengan benang warna merah. Kondisi ini menurut dokter dapat memicu infeksi sampai ke daerah rahim (Halaqah Online #Seri 6 "Pencegahan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)", Jaringan KUPI, 30 Agustus 2021).

P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis banyak pula dialami oleh perempuan lain di wilayah yang berbeda. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 (riset terakhir yang menyertakan khitan perempuan) menyebutkan bahwa 51,2% anak perempuan berusia 0-11 tahun dikhitan. Angka tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo (83,7%) dan terendah di provinsi NTT (2,7%). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa setidaknya 13,4 juta perempuan Indonesia yang berusia 11 tahun ke bawah mengalami P2GP tanpa alasan medis. Angka ini membawa Indonesia pada tahun 2016 menjadi negara terbesar ketiga yang melakukan praktik P2GP tanpa alasan medis (ugm.ac.id, 2020). Riset selanjutnya menemukan dari 12.800 rumah tangga di 33 provinsi terdapat 55% anak perempuan usia 15-49 tahun yang

mengalami praktik khitan. Sebanyak 33,7% secara simbolis dan 21,3% mengandung pemotongan dan/atau pelukaan (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2021).

Penelitian di atas memang tidak menyertakan cara khitan perempuan, namun penelitian Komnas Perempuan dan PSKK UGM di 7 propinsi dengan angka tertinggi yang mempraktikkan khitan perempuan menunjukkan adanya lima kategori cara khitan perempuan, yaitu: 1) menusuk, mengiris, mengikis, dan membakar area genital; 2) mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar klitoris dan/atau lipatan kulit yang mengelilinginya; 3) memotong sebagian klitoris dan lipatan kulit yang mengelilinginya; 4) menggores atau mengorek bagian uretra (saluran kemih); dan 5) simbolis (tanpa pelukaan). Empat dari lima kategori ini mengandung unsur pelukaan bahkan pemotongan dan angkanya mencapai 98,8% (Komnas Perempuan dan PSKK UGM, 2017).

Praktik pemotongan dan pelukaan yang membahayakan genitalia perempuan di Indonesia pada umumnya dilakukan pada usia 0-11 tahun. Karena itu, meskipun angkanya tinggi namun pada umumnya perempuan tidak menyadari dampaknya saat dewasa. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak khitan perempuan membuktikan bahwa beberapa perempuan yang bersedia membuat foto dirinya sendiri, ternyata di antara mereka ada juga yang hilang sama sekali klitorisnya (Habsyah, 2009).

Tidak adanya SOP menyebabkan adanya keragaman cara yang digunakan dalam melakukan tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis, termasuk khitan perempuan. Misalnya diusap, digores, dipotong dengan peralatan meliputi gunting, kapas, pinset, jarum, dan koin berlubang (Kalyanamitra, 2021); menggosok organ kelamin perempuan dengan daun yang teksturnya kasar, menggores dengan *Dotta* (daun Lontara yang sudah kering), dengan silet sampai berdarah, kapas atau kunyit, dan dengan memasukkan ayam ke dalam sarung lalu didekatkan untuk mematok organ kelamin lalu

darah yang berasal dari ayam tersebut dioleskan ke dahi perempuan yang dikhitan (Maryam, 2022); memotong atau menggores klitoris (Nurdiana, 2010); mengoleskan kunyit dan telur ke organ kelamin perempuan, dengan melukai bagian vagina menggunakan jarum kecil atau benda lainnya (Lestari, 2021).

Tidak adanya SOP juga menyebabkan P2GP, termasuk khitan perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis, bukanlah tindakan medis walaupun dilakukan oleh tenaga medis (malpraktek). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis, terutama khitan perempuan, masih banyak dilakukan oleh tenaga medis. Khitan perempuan di perkotaan pada umumnya dilakukan oleh bidan (Kemenkes RI, 2018), tenaga medis yang melakukan P2GP di wilayah perkotaan sekitar 66,4%, sedangkan di pedesaan sekitar 25,8%, (Herdiyani dan Terome, 2021), khitan perempuan dilakukan oleh dokter 14,6%, dan bidan 61% (Sisca, Agustus 2021).

Penyunat perempuan di samping dukun bayi dan dukun sunat adalah bidan, tenaga kesehatan lain (Komnas Perempuan dan PSKK UGM, 2017; dan Rofiq, 2019). Lebih lanjut penelitian mengungkapkan bahwa petugas kesehatan (bidan/ perawat) mendapatkan cara melakukan khitan perempuan dari teman kerja yang lebih senior (Komnas Perempuan dan PSKK UGM, 2017). Selain tenaga medis, P2GP tanpa alasan medis termasuk khitan, dilakukan oleh tenaga non medis yang memiliki sebutan bermacam-macam seperti *Paraji*, *Sanro*, dukun bayi yang juga belajar dari pendahulunya secara turun temurun.

Malpraktik ini terjadi karena tidak adanya aturan perundangan yang secara tegas melarang. Pada tahun 2006 Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran No. HK 00.07.1.31047 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan Bagi Petugas Kesehatan. Pada tahun 2010 Menteri Kesehatan RI menerbitkan Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang

Sunat Perempuan yang mengatur cara melakukan sunat perempuan. Pada tahun 2014 Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Permenkes No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/ER XII/2010 tentang Sunat Perempuan dan memberi kewenangan pada Majelis Syara' Kementerian Kesehatan untuk memberi fatwa tentang sunat perempuan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa P2GP mengandung mafsadat bahkan *madlarat* dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, baik secara fisik, ataupun psikis pada perempuan; tidak dikenal di dunia medis sehingga tidak ada SOP-nya, namun praktiknya masih sangat banyak dilakukan, termasuk oleh tenaga medis. Berdasarkan persoalan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan (*as'ilah*) berikut ini:

- a. Apa hukum melakukan tindakan pemotongan dan/atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis?
- b. Siapakah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah tindakan pemotongan dan/atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis?
- c. Apa hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan pelukaan dan/atau pemotongan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis?

2. ADILLAH (DASAR HUKUM)

a. Nash Al-Qur'ân

- 1) Kemuliaan anak-anak Adam

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-

baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. *al-Isrâ* (17): 70).

2) Larangan menyakiti

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَآثِمًا مُبِينًا^٤

“Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. *al-Ahzâb* (33): 58).

3) Larangan membiarkan generasi yang lemah

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 9).

4) Larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kalian menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. *al-Baqarah* (2): 195).

5) Larangan merampas hak dan berbuat kerusakan

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٥

“Janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183).

- 6) Perintah memperlakukan perempuan secara bermartabat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian menjadikan perempuan sebagai warisan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. *an-Nisâ`* (4):19).

- 7) Perintah untuk berempati pada istri yang sedang sakit karena menstruasi

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya padamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Ia adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit.” Karena itu, jauhilah istri kalian selama haid (jangan mereka diasingkan); dan jangan kalian dekati mereka sampai suci. Apabila mereka menyucikan diri, pergaulilah mereka sesuai dengan (ketentuan)

kedua orang tuamu. Hanya pada-Aku kembali kalian.” (QS. *Luqmân* (31):14).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (QS. *al-Ahqâf* (46): 15).

- 10) Perintah untuk melindungi diri dan keluarga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. *at-Tahrîm* (66): 6).

- 11) Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menolong, menjaga dan melindungi satu sama lain

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, mereka saling menjadi penolong satu sama lain. Mereka bahu-membahu memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. *at-Taubah* (9): 71).

- 12) Perintah untuk berkonsultasi kepada ahlinya.

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.” (QS. *an-Nahl* (16): 43).

- 13) Perintah bersikap adil pada semua pihak

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. *al-Mâ'idah* (5): 2).

- 14) Perintah agar menggunakan wewenang dengan adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. *an-Nisâ`* (4): 58).

- 15) Perintah untuk menjadi umat terbaik

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَآكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. *Âli ‘Imrân* (3): 110).

b. *Nash Hadîts*

- 1) Larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ».

“Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya.” (*Muwaththa’ Mâlik*, no. 1435; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430 dan 2431; *Musnad Ahmad*, no. 2912 dan 2322).

- 2) Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

“Rasulullah Saw bersabda: “Saling berwasiatlah kalian untuk selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka seringkali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924)

- 3) Perintah melindungi dan merawat anak perempuan secara baik

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

“Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang melindungi anak-anak perempuan ini, serta mendidiknya secara baik, maka mereka akan menjadi perisai baginya (yang merawat mereka) dari api neraka.” (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 6061).

- 4) Menyayangi anak-anak kecil sebagai karakter kenabian

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا

“Rasulullah Saw bersabda: “Bukan golongan dari kami dia yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua.” (*Sunan Turmudzi*, no. 2043).

- 5) Larangan menyakiti manusia

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ

“Rasulullah Saw bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan mereka.” (*Musnad Ahmad*, no. 22837).

- 6) Perintah semua pihak untuk menjalankan tanggung jawabnya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 901, 2448, 2594, 2597, 2789 dan 5255).

- 7) Dukungan bagi pemimpin penyayang yang menghadirkan kebaikan bukan keburukan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ
وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

“Rasulullah Saw bersabda: “Ya Allah, orang yang mengelola urusan umatku, lalu melakukan kesulitan bagi mereka, maka sulitkanlah ia, dan jika ia memudahkan (urusan) mereka, maka mudahkan (urusan)-nya juga.” (*Shahîh Muslim*, no. 4826).

- 8) Larangan berkhianat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ:
إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُوتِيَ خَانَ

“Rasulullah Saw bersabda: “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia mengingkari, dan bila diberikan amanat dia berkhianat.” (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 33).

c. *Aqwâl al-'Ulamâ`*

- 1) Tujuan syariat Islam (*maqâshid asy-syari'ah*) adalah perlindungan jiwa, akal, harta, agama, keluarga, termasuk organ kelamin

أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال، مقصود في الشرع

“Sesungguhnya perlindungan jiwa, akal, organ kelamin, dan harta merupakan tujuan syari'at.” (al-Ghazali, 1971: 160).

فَقَدَّ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ -بَلْ سَائِرِ الْمَلَلِ- عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وَضَعَتْ لِلْمَحَافَظَةِ
عَلَى الصَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ -وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ،
وَالْعَقْلُ

“Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa syari'at ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.” (asy-Syathibi, 2012: j. 1, hlm. 31).

- 2) Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan kaidah hukum Islam

الضرر يزال

“Bahaya harus dihilangkan.” (as-Suyuthi, 1983: 83).

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 87).

الضرر لا يزال بالضرر

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lainnya.” (as-Suyuthi, 1983:j.1, hlm. 86).

- 3) Kemaslahatan yang pasti tidak bisa ditinggalkan untuk suatu hal yang masih asumtif

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Hal-hal yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 7).

- 4) Hukum asal terkait organ kelamin adalah haram

الأصل في الأبضاع التحريم

“Hukum asal terkait organ kelamin adalah haram.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 161).

- 5) Tindakan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan bukanlah bagian dari syariat dan tidak bisa diberlakukan

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ
وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا
فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا،
وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْبَعْثِ فَلَيْسَتْ مِنَ
الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

“Sesungguhnya fondasi dan dasar syari’at adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh ajaran syari’at adalah (berisi) keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Setiap rumusan hukum yang keluar dari nilai keadilan menuju kezaliman, dari kerahmatan menuju sebaliknya, dari *mashlahah* menuju *mafsadah*, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syari’at, meskipun berupaya dimasukkan beragam *ta’wil* di dalamnya.” (Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1432 H: j. 3, h. 14).

فإن فات قطعاً فالأصح لا يعتبر

“Jika secara pasti tidak ditemukan tujuan syariat, menurut pendapat yang paling *shahih*, maka hukum tidak dapat berlaku.” (al-Anshari, 1999: 129).

6) Larangan melukai anggota tubuh makhluk hidup

ان حكم الشرع في الختان لا يخضع لنص منقول وإنما يخضع في الذكروالأنثى لقاعدة شرعية عامة وهي أن ايلا المالحى لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه

“Hukum syari’at tentang khitan, tidak didasarkan pada dalil naqli. Khitan laki-laki dan perempuan didasarkan pada kaidah umum syari’at bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup hanya dibolehkan apabila ada kemaslahatan yang kembali padanya dan atau ada kemaslahatan yang lebih prioritas dari sakit yang dideritanya.” (Syaltut, *al-Fatâwâ*, 333).

7) Rasulullah Saw tidak mengkhitan putri-putrinya

لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته رضي الله عنهن، ولا نقل عنه أحد من أهل العلم قاطبة، فإن ختان البنات لم يكن مشتهرا في قريش، وهذا بخلاف أهل المدينة من الأنصار

“Tidak diketahui dari Rasulullah bahwasanya beliau mengkhitan anak-anak perempuannya, dan tidak satu pun dari ulama yang menukil riwayat tersebut, maka sesungguhnya khitan perempuan tidak dikenal bagi masyarakat Quraisy, dan hal ini berbeda dengan kaum Anshar di Madinah.” (Muwâfi, tt.: 74).

فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته مع انتشاره في المدينة، وهو أسوتنا يبين المسلك القويم في تلك القضية كما إنه لم يرد نص صريح يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم.

“Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengkhitan putri-putrinya padahal khitan perempuan merupakan hal yang populer di Madinah. Beliau memberikan contoh menjelaskan cara yang terbaik dalam merespons masalah ini. Tidak ada pula

riwayat yang jelas bahwa Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk mengkhitan putri-putrinya.” (Jum’ah, 2009: 99).

- 8) Sumber-sumber hadits mengenai khitan perempuan adalah lemah dan tidak otoritatif

ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع

“Tidak ada satu pun hadits yang bisa dijadikan rujukan dalam khitan perempuan dan tidak ada satu pun hadits yang bisa diikuti.” (Ibnu Hajar al-‘Asqallani, 1998: j. 4, hlm. 83).

وحديث ختان المرأة زوي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة
مخدوشة لا يصح الاحتجاج به] اهـ

“Hadits tentang khitan perempuan diriwayatkan dari banyak jalur sanad, tetapi semuanya lemah, memiliki cacat dan tidak tepat dijadikan dalil.” (Syams al-Haq Abady, tt.: j. 14, hlm. 126).

أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء.

“Hadits-hadits yang memerintahkan khitan perempuan adalah *dla’if* seluruhnya, tidak ada satu pun yang *shahih*.” (Sabiq, 1987: j. 1, hlm. 37).

- 9) Khitan perempuan tidak memiliki dasar kuat dari sisi syari’ah, akhlaq, dan medis

والواقع أن المسألة في جانبها الإيجابي والسلبي ترجع إلى الخلق
والبيئة وإحسان التربية وحسم المراقبة. ومن هنا يتبين أن ختان
الأنثى ليس ما لدينا يدعو إليه وإلى تحتمه لا شرعا ولا خلقا ولا طبا

“Realitasnya, masalah perilaku positif dan negatif perempuan itu kembali pada akhlak, lingkungan, didikan dan pengawasan yang baik (bukan disebabkan oleh khitan atau tidak khitan). Berdasarkan itu, maka menjadi jelas bahwasanya tidak ada alasan

yang mendukung untuk khitan perempuan, baik dari sisi syari'at, akhlak, maupun medis.” (Syaltut, 1995: 333).

- 10) Khitan perempuan bukan masalah agama, melainkan kebiasaan dan tradisi semata

إن قضية ختان الأنثى ليست قضية دينية تعبدية في أصلها وإنما هي قضية طبية عادية أي من قبيل موروث العادات.

“Masalah khitan perempuan bukan masalah keagamaan yang bersifat *ta'abbudi*, melainkan masalah tradisi pengobatan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.” (Jum'ah, 2009: 91).

- 11) Keharaman khitan perempuan yang membahayakan

إنه لا يوجد نص في القرآن الكريم، يتحدث عن ختان الإناث، موضحاً أن ختان الإناث عادة سيئة، وحرام شرعاً.

“*Majma' al-Buhûts al-Islâmiyah* menyatakan bahwa tidak ditemukannya *nash* dalam al-Qur'an yang membicarakan khitan perempuan mempertegas bahwa khitan perempuan merupakan tradisi yang buruk dan haram secara syariat.” (al-Jundi, 2017).

يكون ختان الإناث أو خفاضها بالطريقة التي يجري بها الآن، وبغير مسوغ يوجبها: أمراً غير مأذون به بل محظوراً شرعاً، وداخلاً في (تغيير خلق الله) الذي من عمل الشيطان، وليس هناك إذن من الله.

“Sunat perempuan, atau *khifâdl*, dengan cara yang sekarang berjalan, jika tidak ada alasan yang diperlukan, adalah sesuatu yang tidak diizinkan, bahkan dilarang hukum Islam. Ia masuk dalam kategori (mengubah ciptaan Allah Swt) perbuatan setan, yang sama sekali tidak diizinkan Allah Swt.” (Yusuf al-Qaradawi, dalam Abu Surur dan Rajab, 2013: 47).

- 12) “Hukum khitan perempuan yang mengandung kemadlaratan adalah haram.” (Risalah Bogor, 2018).

- 13) “Praktik memerintahkan dan melakukan P2GP dilarang keras oleh agama, kecuali untuk kemaslahatan pada kasus-kasus tertentu saja sesuai pertimbangan medis.” (Taushiyah Bogor, 2021).
- 14) “Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dlarar*.” (Fatwa MUI No. 9A, 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan).
- 15) “Hukum khitan bagi wanita berbeza mengikut keadaan alat sulit seseorang wanita. Ia berdasarkan keadaan setiap wanita setelah ditentukan keperluannya oleh pakar. Jika seseorang wanita mendapati dirinya perlu melakukan khitan dan dipersetujui oleh pakar, maka ianya satu *makrûmah* (penghormatan) seperti dalam hadits Ummu ‘Atiyyah yang dinilai hasan oleh sebahagian ulama. Sekiranya didapati tiada keperluan melakukan khitan, maka khitan tidak perlu dilakukan untuk dirinya.” (Mesyuarat, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-29, tahun 2017, tentang Hukum Khitan Anak Perempuan).
- 16) Pelaku khitan perempuan dapat dipidanakan

ختان الإناث مُحَرَّمٌ شَرْعًا وَمُجْرَمٌ قَانُونًا فَلَا يَجُوزُ لِأَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ
الْإِقْدَامَ عَلَى خِتَانِ بَنَاتِهِمْ لِثَبُوتِ ضَرَرِهِ الطَّبِيِّ وَالنَّفْسِيِّ الْجَسِيمِ
بِشَهَادَةِ الْأَطْبَاءِ، وَكَذَلِكَ يُحْرَمُ الْإِقْدَامُ عَلَى مِمَارَسَتِهِ مِنَ الطَّبِيبِ أَوْ

الْإِعَانَةِ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَالَاتِ الضَّرُورَةِ الْمَرْضِيَّةِ الَّتِي حَدَّدَهَا الْقَانُونُ

“Khitan perempuan menurut syari’at adalah haram dan menurut hukum perundangan adalah pidana. Karena itu, para wali tidak boleh mengkhitan anak-anak perempuan mereka disebabkan adanya bahaya secara medis dan psikis berdasarkan kesaksian para tenaga medis. Demikian pula, tenaga medis diharamkan melakukan membantu tindakan khitan perempuan kecuali dalam kondisi darurat atau penyakit yang dibenarkan menurut undang-undang.” (Allam, 2007, Darul Ifta Mishriyyah).

تحريم ختان الاناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

“Keharaman khitan perempuan pada masa kini adalah pendapat yang benar dan sesuai dengan *maqâshid asy-syarî'ah* serta kemaslahatan makhluk. Sementara itu, memerangi tradisi ini adalah bentuk penerapan perlindungan sesuai dengan kehendak Allah terhadap makhluk-Nya. Di samping itu, melanggar tradisi ini juga bertentangan dengan syariat Islam dan undang-undang sehingga ikhtiar untuk menghentikannya merupakan wujud dari amar ma'rif nahi munkar.” (al-Munazhamah al-'Alamiyyah li-Kharrijji al-Azhar, 2014).

الختان الذى يمارس الآن يلحق الضرر بالمرأة جسديا ونفسيا. ولذا يجب الامتناع عنه إمتثالا لقيمة عليا من قيم الاسلام. وهى عدم الحاق الضرر بالانسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" بل يعد عدوانا يوجب العقاب

“Khitan Perempuan yang dipraktikkan sekarang ini telah menimbulkan bahaya, baik terhadap tubuh maupun psikologi perempuan. Oleh karena itu, ia harus dicegah sebagai bentuk keluhuran nilai Islam, berupa larangan menempatkan seseorang dalam bahaya sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda “Tidak ada kemandlaratan bagi diri sendiri dan orang lain.” Bahkan ia bisa disebut pelanggaran yang pelakunya harus dihukum.” (Muktamar Ulama Dunia di Kairo, 2006).

- 17) Kewajiban pemerintah untuk memenuhi kemaslahatan warganya

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin atas rakyat berpijak pada kemaslahatan.”
(as-Suyuthi, 1983: j.1, hlm. 121).

d. Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar 1945)

- 1) Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- 2) Pasal 28B: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- 3) Pasal 28G Ayat 1: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- 4) Pasal 28G Ayat 2: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
- 5) Pasal 28I Ayat 1: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.”

3. ISTIDLÂL (ANALISIS)

P2GP (Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan) adalah prosedur pemotongan organ kelamin perempuan, baik sebagian atau keseluruhan atau dalam bentuk apa pun yang melukai organ kelamin perempuan dengan alasan di luar medis. Meskipun definisi P2GP hanya meliputi tindakan dengan alasan di luar medis, namun

Musyawarah Keagamaan KUPI tetap menggunakan istilah “P2GP tanpa alasan medis.”

Di samping itu, mengingat bahaya yang mengancam dalam tindakan P2GP, maka Musyawarah Keagamaan KUPI menggunakan istilah P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran adanya banyak tindakan pemotongan dan pelukaan organ kelamin perempuan dengan nama-nama berbeda yang juga berbahaya dan terjadi tanpa alasan medis.

Anatomi dan fungsi organ kelamin laki-laki berbeda dengan organ kelamin perempuan. Organ kelamin laki-laki bersifat tertutup dan memiliki kulup, yaitu kulit yang bisa dipotong tanpa memotong daging. Ia berfungsi sebagai saluran air seni, *wadzî*, *madzî*, dan sperma (*manî*). Pemotongan kulup yang terjadi pada khitan laki-laki dapat memperlancar fungsi tersebut. Karenanya, meskipun dilakukan tanpa alasan medis, khitan laki-laki bisa meningkatkan kualitas kesehatan sehingga diakui di dunia kesehatan dan SOP (*Standard Operating Procedure*)-nya pun diajarkan di lembaga pendidikan kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

Sebaliknya, organ kelamin perempuan bersifat terbuka, semua kulit menempel pada daging, dan tidak ada bagian kulit yang dapat dipotong tanpa memotong bagian daging. Klitoris yang rentan dipotong dalam P2GP setara dengan kepala penis. Sementara *clitoral hood* (lipatan kulit yang menutupi klitoris) yang dianggap sama dengan kulup sesungguhnya berbeda. Pemotongan kulup pada organ kelamin laki-laki tidak memberi dampak buruk bahkan sebaliknya baik karena keberadaan kulup menghalangi proses penyucian (*thahârah*). Sementara *clitoral hood* itu justru harus dijaga supaya bisa melindungi kelenjar sensitif pada klitoris dari gesekan konstan dan tidak konstan dalam kehidupan sehari-hari karena klitoris adalah organ perempuan yang mempunyai ujung saraf terbanyak.

Karena bentuknya yang tipis dan menempel pada klitoris, pemotongan *clitoral hood* sering kali juga sekaligus memotong klitoris

yang justru sangat berbahaya. Pelukaan apalagi pemotongan pada *clitoral hood* dan klitoris yang kerap terjadi dalam praktik P2GP mempunyai risiko besar pada putusnya jaringan saraf penting yang ada di organ kelamin perempuan sehingga membahayakan dan bisa mempersulit fungsinya.

Organ kelamin perempuan berfungsi sebagai saluran air seni, *madzî*, *wadzî*, darah menstruasi, darah persalinan (*wilâdah*), darah nifas, darah *istihâdlah*, bahkan jalan keluar bayi. Untuk berbagai fungsi tersebut, Allah Swt telah melengkapinya dengan jaringan syaraf dan sel darah.

P2GP membahayakan karena bisa membuat jaringan syaraf dan sel darah rusak, putus, bahkan hilang sehingga terjadi pendarahan hebat hingga kematian. Jika pun tanpa pendarahan hebat dan tidak sampai pada kematian, maka fungsi-fungsi reproduksi tersebut akan terganggu selama kehidupannya.

Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI (2019), dr. Erna Mulati, MSc., CMFM, menegaskan dampak buruk P2GP adalah:

- 1) Dampak jangka pendek: P2GP tanpa alasan medis biasanya tidak menggunakan obat bius sehingga perempuan dapat mengalami nyeri hebat. Sesuai dengan fungsinya yang beragam hingga mengeluarkan bayi, organ kelamin perempuan bagian luar dipenuhi dengan jaringan syaraf dan pembuluh darah pendukung sehingga P2GP dapat menimbulkan perdarahan yang hebat. Pelukaan pada organ kelamin perempuan, baik ringan apalagi berat, jika tidak dirawat dengan tepat akan menimbulkan infeksi, pembengkakan pada jaringan, dan sulit berkemih;
- 2) Dampak jangka panjang: Pelukaan apalagi pemotongan struktur genital seksual yang sensitif seperti *gland clitoris* dan bagian dari labia minora bisa menyebabkan penurunan respons serta kepuasan seksual dan timbulnya jaringan parut pada bagian vulva (area kulit yang mengelilingi saluran kencing/uretra dan vagina, termasuk klitoris dan labia) yang dapat menyebabkan

nyeri terutama saat berhubungan seksual. Trauma fisik karena sakit hebat juga bisa menyebabkan trauma psikis yang bisa menimbulkan gangguan bagi kesehatan jiwa

Senada dengan penjelasan di atas, dokter spesialis kandungan, dr. Fadli, Sp.OG (2021) menyatakan bahwa P2GP mengakibatkan gangguan fisik seperti pendarahan hebat, infeksi, sakit saat berkemih, pembengkakan jaringan kelamin, pendarahan, risiko gangguan fungsi seksual yang meliputi sakit saat berhubungan seksual (*dyspareunia*), menurunnya kepuasan seksual, mengurangi hasrat dan gairah seksual, mengurangi frekuensi orgasme, bahkan hingga mengakibatkan kematian.

Dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis di atas semakin besar mengingat tindakan ini tidak dikenal di dunia kesehatan sehingga SOP tidak diajarkan di dunia medis. Hal ini berarti bahwa tindakan P2GP tanpa alasan medis baik dilakukan oleh tenaga medis maupun bukan, tidaklah memiliki standar sehingga dilakukan secara bermacam-macam. Tindakan yang dilakukan oleh dukun bayi atau tenaga non medis lainnya tidak selalu dengan cara simbolik yang tidak mengandung pelukaan dan/ atau pemotongan. Begitu pun yang dilakukan dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya tidak selalu mengandung pelukaan dan/ atau pemotongan. Jadi, P2GP baik dilakukan oleh tenaga medis maupun non medis tidak ada standar dan sangat mungkin mengandung pelukaan dan/atau pemotongan karena mengacu pada cara khitan laki-laki.

Perempuan akan mengalami peran reproduksi yang kompleks: menstruasi dalam durasi mingguan dan berdampak sakit (*adzâ*), hamil dalam durasi bulanan, melahirkan dalam durasi jam atau harian, nifas dalam durasi minggu bahkan bisa sampai 2 bulan, menyusui bayi dalam durasi 2 tahun. Berturut-turutnya hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui bayi ini disebut al-Qur'an sebagai pengalaman yang melelahkan (*kurhan*) bahkan lelah atau sakit berlipat-lipat (*wahnan alâ wahnin*). Hal ini berbanding terbalik dengan peran reproduksi

laki-laki yang hanya mengeluarkan sperma dalam durasi menit atau bahkan detik dan dampaknya nikmat.

Perbedaan sangat kontras antara anatomi dan fungsi organ kelamin laki-laki dan perempuan dan pengalaman reproduksi keduanya, begitu pun dampak secara kesehatan dan sosialnya. Dampak yang diakibatkan khitan terhadap laki-laki sangat berlawanan dengan dampak yang dialami perempuan dari khitan, apalagi P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis. Bagi laki-laki membawa kemaslahatan namun bagi perempuan berdampak buruk pada sistem reproduksi perempuan sehingga bisa menyebabkan menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui bayi sebagai pengalaman yang terjalin berkelindan secara sistemik menjadi semakin *adzâ, kurhan, dan wahnâ alâ wahnin*.

Tindakan P2GP yang membahayakan dan beresiko, bahkan telah menyebabkan pengalaman reproduksi perempuan yang sudah sakit, lelah, bahkan sakit dan lelah berlipat-lipat ini menjadi semakin sakit, jelas bertentangan dengan perintah Allah untuk memuliakan manusia (QS. *al-Isrâ* (17): 70), dan melanggar larangan untuk menyakiti (QS. *al-Ahzâb* (33): 58), peringatan Allah untuk tidak mewariskan generasi yang lemah (QS. *an-Nisâ`* (4): 9), larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan (QS. *al-Baqarah* (2): 195), dan larangan merampas hak dan berbuat kerusakan (QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183), termasuk melanggar perintah Allah Swt bagi semua orang untuk menjaga, melindungi, dan merawat organ kelaminya (QS. *al-Ahzâb* (33): 35).

Tindakan P2GP yang membahayakan bisa memperburuk pengalaman reproduksi perempuan juga telah melanggar perintah Allah untuk memperlakukan perempuan secara bermartabat (QS. *an-Nisâ`* (4): 19), tidak mengindahkan perintah Allah untuk berempati pada rasa sakit yang dialami perempuan karena menstruasi (QS. *al-Baqarah* (2): 222), dan tidak menjalankan wasiat Allah untuk berterima kasih pada perempuan atas peran reproduksi mereka yang sakit berlipat (QS. *Luqmân* (31): 14).

P2GP yang membahayakan juga melanggar wasiat Rasulullah Saw

agar selalu berbuat baik pada perempuan (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924), merawat dan melindungi bayi perempuan dari segala bahaya (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 6061), perintah untuk selalu menyayangi anak-anak kecil (*Sunan Turmuzî*, no. 2043), dan perintah umum untuk tidak menyakiti manusia (*Musnad Ahmad*, no. 22837).

Tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis juga bertentangan dengan perintah Rasulullah Saw untuk meniadakan segala bahaya dari diri sendiri (*dlarar*) dan orang lain (*dhirâr*) (*Muwaththa' Mialik*, no. 1435; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430 dan 2431; *Musnad Ahmad*, no. 2912 dan 2322), karena ia bisa membahayakan fungsi reproduksi perempuan menjadi semakin sakit.

Membiarkan dampak buruk apalagi bahaya dalam tindakan P2GP tanpa alasan medis juga bertentangan dengan tujuan syari'at Islam (*maqâshid syari'ah*), terutama menjaga jiwa (*hifdh an-nafs*) karena bisa menyebabkan trauma psikis secara berkepanjangan, bahkan bisa menyebabkan pendarahan hebat yang mengantarkan pada kematian; menjaga akal (*hifdh al-'aqli*) karena membenarkannya berarti menentang pengetahuan yang telah terbukti secara ilmiah; menjaga martabat (*hifdh al-'irdl*) karena merusak organ kelamin perempuan sebagai organ vital reproduksinya (*hifdh al-budl'*) sebagai manusia; dan menjaga keturunan (*hifdh an-nasl*) karena berpotensi bahkan telah terbukti merusak sistem reproduksi perempuan sebagai organ penting dalam melahirkan keturunan.

P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis juga bertentangan dengan kaidah fiqh bahwa bahaya itu harus dihilangkan (الضرر يزال). Sementara kekhawatiran atas bahaya tidak terkendalinya hasrat seksual perempuan tidak bisa diatasi dengan tindakan P2GP tanpa alasan medis yang nyata membahayakan (bahaya tidak bisa diatasi dengan bahaya yang lain, الضرر لا يزال بالضرر). Apalagi kekhawatiran tersebut bersifat asumptif, sedangkan bahaya P2GP bersifat pasti sehingga (Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang masih asumptif, الأتيقن لا يزال بالشك).

Jika pun P2GP diyakini ada manfaat di samping dampak buruknya, maka pencegahan atas dampak buruk yang lebih nyata mesti diprioritaskan atas penarikan kemaslahatannya (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). Padahal, kemaslahatan P2GP tersebut masih bersifat asumsi, belum terbukti secara nyata, dan tidak ada dukungan medis ilmiah sama sekali.

Mahmud Syaltut dalam *al-Fatâwia* menegaskan bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup hanya dibolehkan apabila kemaslahatannya kembali pada makhluk tersebut. Hal ini tidak terjadi pada P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis. Motif P2GP untuk mengendalikan hasrat seksual perempuan agar berperilaku baik, juga tidak beralasan karena faktanya baik buruknya perilaku perempuan lebih ditentukan oleh akhlak, lingkungan, pendidikan dan bimbingan yang baik. Jelaslah bahwa tidak ada alasan yang mendukung khitan perempuan, baik dari sisi Syariat, akhlak, maupun medis. Hal ini diperkuat oleh pandang Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir tahun 2003-2013, yang mengatakan bahwa khitan perempuan bukanlah masalah keagamaan yang bersifat *tabbudi* (bernilai ibadah), melainkan hanya tradisi pengobatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ahmad ath-Thayyib, Syekh al-Azhar Mesir, bahkan menegaskan bahwa khitan perempuan adalah tradisi yang berbahaya.

Sikap Universitas al-Azhar Kairo, sebuah rujukan penting umat Islam dunia, secara resmi menyatakan bahwa khitan perempuan itu berbahaya bagi perempuan, berdampak buruk bagi kehidupan pernikahannya, bukan merupakan bagian dari agama, melainkan adat istiadat semata, tidak ada dalil yang menganjurkannya baik dari al-Qur'an maupun hadits, sehingga bisa dilarang (*maḥdhûr*) dan pelakunya bisa dihukum pidana dalam perspektif hukum Islam (Jaridah Shaut al-Azhar, 18 Juli 2020).

Khitan perempuan adalah tradisi yang sudah lama ada jauh sebelum Rasulullah Saw diutus. Bahkan sebelum Rasul Isa As. diutus ke umat Nasrani, dan sebelum Rasul Musa As. diutus ke umat Yahudi,

yakni di wilayah yang saat ini disebut Timur Tengah sekitar 4000 SM. Pendapat lain menyebutkan khitan perempuan telah dilakukan hampir 2000 tahun sebelum Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa praktik khitan perempuan berasal dari tradisi masa lalu (*al-atsar al-qadîmah*) yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam kurun waktu yang sangat panjang di berbagai belahan dunia, jauh sebelum Islam muncul (Abu Surur and Rajab, 2017).

Dalil-dalil yang digunakan untuk melegitimasi kebaikan khitan perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis juga tidak kuat. Ayat tentang perlunya mengikuti *millah* Ibrahim As adalah berkaitan dengan tauhid dan haji, tidak terkait dengan khitan perempuan. Demikian pula hadits-hadits tentang khitan perempuan tidak satu pun sanadnya bisa diikuti sebagaimana pendapat Ibnu Mundzir yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *at-Talkhîs al-Kabîr*. Pendapat ini juga dipegang oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*.

Menurut Asy-Syaukani dalam *Nayl al-Authâr*, hadits tentang Ummu Athiyah sebagai dukun sunat dari aspek sanadnya adalah lemah, karena al-Bukhari, Ibn ‘Adiy dan ath-Thabrani, sebagaimana dikutip Imam Asy-Syaukani, menilai periwayatnya, yaitu Za’idah ibn Abi ar-Raqad, sebagai periwayat yang haditsnya tidak diterima (*munkar al-hadîts*). Selain itu, tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Anas kecuali Tsabit, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Tsabit kecuali Za’idah, dan tidak ada dari Za’idah kecuali Muhammad ibn Salam.

Adapun dari aspek matan, hadits ini mengandung pesan pengurangan bertahap praktik khitan perempuan yang telah berlangsung lama di Madinah. Hal ini diindikasikan oleh tidak adanya riwayat tentang khitannya istri dan putri-putri Rasulullah Saw sebagaimana diungkapkan oleh al-Muwafi dalam *Khitân al-Inâts bayn al-Masyrû’iyyah wal Hadhr* dan Ali Jum’ah dalam *al-Bayân li mâ Yusyghil al-Adzhan*. Hadits-hadits tentang khitan perempuan menurut Syams al-Haq Abady dalam *Aun al-Ma’bûd* diriwayatkan melalui

banyak jalur namun semua sanadnya lemah, cacat, dan bermasalah (*dla'îfah*, *ma'lûlah*, dan *makhdûsyah*) sehingga tidak sah dijadikan sumber hukum.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* juga menegaskan bahwa status seluruh hadits yang memerintahkan khitan perempuan adalah lemah (*dla'îf*). Tidak adanya hadits masyhur tentang khitan perempuan menurut Yusuf Al-Qaradhawi juga menunjukkan bahwa praktik ini bukanlah syari'at. Seandainya khitan perempuan itu merupakan syariat, mestinya akan dipraktikkan oleh setiap keluarga muslim.

Adapun hadits *fithrah* yang sering dikaitkan dengan khitan perempuan ada dua. Pertama, menyebutkan bahwa khitan adalah bagian dari lima *fithrah*, yaitu: khitan, mencukur bulu organ kelamin, mencukur kumis, menggunting kuku, dan mencukur bulu ketiak. Kedua, tidak menyebutkan khitan sebagai bagian dari sepuluh *fithrah*, yaitu: mencukur kumis, melebatkan jenggot, bersiwak, *istinsyâq* (memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali), menggunting kuku, membasuh celah-celah jari, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu organ kelamin, cebok (*istinjâ'*), dan berkumur (*madlmadlah*).

Menurut Lutfi Fathullah dalam *Fiqh Khitan Perempuan*, *fithrah* memiliki tiga makna: asal mula, agama, dan kebiasaan. Jenis-jenis tindakan lain selain khitan yang juga disebut sebagai *fithrah* menunjukkan bahwa makna *fithrah* dalam dua hadits tersebut hanyalah kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya, hadits tentang *fithrah* tidaklah cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar bagi pensyariaan khitan perempuan.

Hadits yang menyebutkan khitan perempuan sebagai *makrûmah* dinyatakan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubrâ* dan Asy-Syaukani dalam *Nayl al-Authâr* memiliki sanad yang lemah (*dla'îf*) karena periwayat yang bernama Hajjaj ibn Artâ'ah dinilai oleh kritikus hadits seperti Ibn Abi Hatim dalam *al-'Ilal* dan Ibn 'Abd al-Barr dalam *at-Tamhîd*, keduanya memberikan penilaian terhadap Hajjaj sebagai

orang yang tidak dapat dijadikan hujjah (*lâ yuhtajju bih*). Demikian pula dengan Ibn Hajar dan adz-Dzahabi menilai Hajjaj sebagai seorang yang jujur tetapi banyak salah dan melakukan penyamaran/menyembunyikan sesuatu (*shadûq katsîr al-khatha' wa at-tadlîs*).

Makna *makrûmah* dalam hadits tersebut menurut al-Qaradhawi dalam *Fatâwâ Mu'âshirah* adalah sesuatu yang dianggap baik menurut tradisi dan sesungguhnya tidak ada teks syari'at yang mewajibkan atau mensunnahkan. Mahmud Syaltut dalam *al-Fatâwâ* menegaskan hal yang sama, bahwa khitan perempuan hanyalah tradisi yang dipandang baik (*makrûmah*) oleh sebuah masyarakat di suatu tempat dan masa tertentu, yang tidak selalu relevan di tempat dan masa lain. Perkembangan ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan pandangan ulama tentang hukum khitan perempuan. Perkembangan ilmu pengetahuan medis modern menunjukkan bahwa khitan perempuan tanpa alasan adalah tindakan yang membahayakan sehingga tidak lagi bisa dipandang *makrûmah*. Berdasarkan perkembangan pengetahuan di bidang medis ini menjadi dasar fatwa Negeri Perlis Malaysia bahwa khitan perempuan yang *makrûmah* hanyalah yang punya alasan medis.

Muhammad Syahat al-Jundi, salah seorang anggota Lembaga *Majma al-Buhûts al-Islâmiyah*, menegaskan mengenai pandangan lembaganya bahwa khitan perempuan tidak diperintahkan oleh syara' dan tidak pula ditetapkan kebenarannya baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Syekh Ali Jum'ah, *Mufti ad-Diyâr al-Mishriyah* (2003-2013), dalam *al-Bayân li Mâ Yusyghilu al-Adzhan* menegaskan bahwa khitan perempuan bukanlah masalah keagamaan yang bersifat *ta'abbudi* (harus diikuti sebagai ibadah), melainkan tradisi medis yang diwariskan dari generasi ke generasi sesuatu pengetahuan pada saat itu.

Mempertimbangkan dampak buruk bahkan bahaya khitan perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis dan lemahnya dalil-dalil yang menjadi dasar perintahnya, maka beberapa organisasi atau lembaga Islam telah mengeluarkan sikap yang tegas sebagai berikut:

1. *Dâr al-Iftâ Mesir (2007)*: khitan bagi perempuan hukumnya haram secara syara'. Khitan perempuan bukan termasuk tuntunan agama, namun hanya merupakan tradisi masyarakat. Khitan bagi perempuan tidak ada kaitannya dengan *iffah* (pengendalian syahwat), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
2. *Fatwa MUI (2008)*: Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dlarar* (Fatwa MUI No. 9A, 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan);
3. *Majma' al-Buhûts al-Islâmiyah (2017)*: tidak ditemukannya *nash* dalam al-Qur'an yang membicarakan khitan perempuan mempertegas bahwa khitan perempuan merupakan tradisi yang buruk dan haram secara Syariat;
4. *Fatwa Negeri Perlis (2017)*: Hukum khitan bagi wanita berbeza mengikut keadaan alat sulit seseorang wanita. Ia berdasarkan keadaan setiap wanita setelah ditentukan keperluannya oleh pakar. Jika seseorang wanita mendapati dirinya perlu melakukan khitan dan dipersetujui oleh pakar, maka ianya satu *makrûmah* (penghormatan) seperti dalam hadits Ummu 'Atiyyah yang dinilai Hasan oleh sebahagian ulama. Sekiranya didapati tiada keperluan melakukan khitan, maka khitan tidak perlu dilakukan untuk dirinya;
5. *Risalah Bogor (2018)*: Hukum khitan perempuan yang mengandung kemadlaratan adalah haram;
6. *Sikap resmi Universitas al-Azhar Kairo (2020)*: melarang khitan perempuan dan menghukum pelakunya secara pidana, karena khitan bisa membahayakan perempuan dan berdampak buruk bagi kehidupan pernikahannya. Bagi al-Azhar juga khitan perempuan bukan merupakan syari'at Islam, melainkan adat kebiasaan saja, yang harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menolak segala bentuk bahaya, kesakitan, dan kerusakan;

7. *Taushiyah Bogor (2021)*: Praktik memerintahkan dan melakukan P2GP dilarang keras oleh agama kecuali untuk kemaslahatan pada kasus-kasus tertentu saja sesuai pertimbangan medis.

Pandangan tentang haramnya khitan perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis juga direspons oleh pemerintah Mesir dengan mengesahkan undang-undang memidanakan khitan perempuan demi mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang mengatakan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat dilandaskan pada kemaslahatan (rakyat) (تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة).

Muktamar Ulama Dunia di Kairo pada tahun 2006 menegaskan bahwa khitan perempuan yang dipraktikkan sekarang ini telah menimbulkan bahaya, baik terhadap tubuh maupun psikologi perempuan. Oleh karena itu, ia harus dicegah sebagai bentuk keluhuran nilai Islam, berupa larangan menempatkan seseorang dalam bahaya. Bahkan, tindakan ini bisa disebut sebagai pelanggaran serius, yang pelakunya harus dihukum.

Senada dengan keputusan di atas, *Dârul Iftâ* Mesir dalam laman resminya menyatakan bahwa khitan perempuan menurut syari'at adalah haram dan menurut aturan perundangan adalah pidana. Para wali tidak boleh mengkhitan anak-anak perempuan mereka karena adanya bahaya secara medis dan psikis berdasarkan kesaksian para tenaga medis. Demikian pula, tenaga medis diharamkan melakukan atau membantu tindakan khitan perempuan kecuali dalam kondisi darurat atau penyakit yang dibenarkan menurut undang-undang.

Berdasarkan fatwa tersebut pemerintah Mesir dalam UU No. 126 Tahun 2016 tentang Pemberatan Hukuman Pelaku Khitan Perempuan, yang antara lain mengatur hukuman sebagai berikut:

1. Penjara selama 5 sampai dengan 7 tahun bagi mereka yang melakukan pemotongan bagian luar organ genitalia perempuan baik sebagian maupun secara keseluruhan, atau dengan pengirisan yang melukai organ tersebut pelukaan tanpa alasan medis;

2. Hukuman diperberat 3 sampai dengan 15 tahun jika tindakan tersebut menyebabkan cacat permanen atau kematian;
3. Penjara 1 sampai dengan 3 tahun bagi mereka yang meminta FGM dan perempuan telah mengalami FGM dengan cara-cara di atas karenanya.

Tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis juga bertentangan dengan mandat Konstitusi Negara RI terkait dengan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya (Pasal 28A), kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B), perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat (Pasal 28G ayat 1), bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat 2 & 28I ayat 1). Demikian pula, ia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa tindakan apa pun yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, termasuk dalam kategori penyiksaan (Pasal 1 ayat 4) sehingga harus dihindari; tindakan persetujuan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan seseorang termasuk melanggar hak asasi manusia (Pasal 2 & 3 ayat 3); dan hak untuk hidup, tidak disiksa, tidak direndahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 4 & Pasal 33 ayat 1); serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).

Mempertimbangkan dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis maka semua pihak bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan P2GP, terutama diri sendiri, semua anggota keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah, dan media (QS. *Âli 'Imrân*: 110). Hal ini sesuai dengan *nash* al-Qur'an (QS. *at-Taubah* (8): 71) bahwa setiap individu baik laki-laki maupun perempuan harus saling menolong dalam hal kebaikan dan saling menjaga satu sama lain dari segala keburukan. Peran keluarga sangat signifikan dalam

menjaga kehormatan anggota keluarganya dan melindungi mereka (QS. *at-Tahrîm* (66): 6; *al-Ahzâb* (33): 58; dan *al-Baqarah* (2): 195).

Apabila tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya pencegahan P2GP dan bahayanya, maka seharusnya berkonsultasi kepada ahlinya (QS. *an-Nahl* (16): 43), dalam hal ini adalah para tenaga medis. Setiap pihak bertanggung jawab dalam pencegahan P2GP tanpa alasan medis tersebut karena setiap individu pada hakikatnya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 901). Setiap orang yang diberi amanah untuk mengelola urusan orang lain juga diminta untuk menghadirkan kebaikan dan menghapus segala kesulitan (*Shahîh Muslim*, no. 4826).

Demikian pula dengan pemerintah sebagai pelaksana amanat rakyat juga harus merumuskan dan menjalankan kebijakannya dengan berpijak pada kemaslahatan bagi mereka sebagaimana kaidah fiqh (تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة). Selain itu, pemerintah harus menggunakan wewenang yang dimilikinya secara humanis (QS. *an-Nisâ`* (4): 58) dan tidak merampas hak, termasuk hak kesehatan reproduksi bagi perempuan (QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183). Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Penjelasan IV Bab I (Pasal 1-16) menegaskan peran setiap negara memastikan untuk mencegah di wilayah kewenangan hukumnya atas perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (*adillah*) dan analisis (*istidlâl*) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 menjawab pertanyaan-pertanyaan pada *tashawwur*, dengan memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

- a. Hukum melakukan tindakan Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram;
- b. Semua pihak bertanggung jawab mencegah tindakan Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis, terutama anggota keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, LSM, pemerintah, dan media;
- c. Hukum menggunakan wewenang sebagai keluarga, tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis dan media dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) tanpa alasan medis adalah wajib.

5. REKOMENDASI

1. Individu:
 - 1) Mengedukasi diri dan lingkungan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis dari sumber-sumber yang terpercaya;
 - 2) Berpartisipasi aktif dalam pencegahan praktik P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis sesuai dengan kapasitas profesi dan kewenangan masing-masing;
2. Keluarga:
 - 1) Mengedukasi anggota keluarga tentang dampak buruk bahaya tindakan P2GP tanpa alasan medis;
 - 2) Tidak melakukan tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis dalam lingkungan keluarga;
 - 3) Bagi keluarga yang merayakan tasyakuran kelahiran bayi perempuan, menstruasi pertama, dan fase kehidupan perempuan lainnya, mengisinya dengan pendidikan kesehatan

reproduksi dan doa-doa keselamatan tanpa disertai tindakan P2GP;

- 4) Ikut serta dalam upaya pencegahan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis di masyarakat.
3. Masyarakat:
- 1) Tidak melakukan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis;
 - 2) Tidak meminta pelayanan P2GP tanpa alasan medis kepada tenaga medis apalagi kepada tenaga non-medis;
 - 3) Melakukan sosialisasi dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis;
 - 4) Tidak melakukan pembiaran terhadap terjadinya P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis, termasuk memberikan perlindungan kepada anak perempuan yang akan menjadi korban;
 - 5) Mengadvokasi para tokoh masyarakat agar ikut menyosialisasikan sikap dan pandangan keagamaan KUPI tentang perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis;
 - 6) Tidak melakukan stigmatisasi bagi perempuan yang tidak melakukannya.
4. Tenaga Medis:
- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak buruk dan bahaya P2GP dari sudut pandang kesehatan;
 - 2) Tidak melakukan tindakan apa pun yang berdampak buruk pada genitalia perempuan meski tanpa pelukaan dan pemotongan;
 - 3) Tidak menganjurkan, menawarkan, melayani, membiarkan, apalagi mengambil keuntungan dari praktik P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis;

5. Ulama atau Tokoh Agama:
 - 1) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perintah Islam untuk menghindari segala bahaya termasuk bahaya P2GP tanpa alasan medis melalui ceramah-ceramah keagamaan;
 - 2) Melakukan sosialisasi tentang dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis dalam perspektif Islam;
 - 3) Berpartisipasi aktif dalam melindungi umat dari bahaya P2GP tanpa alasan medis, terutama kepada bayi dan anak perempuan yang rentan menjadi korban;
 - 4) Bersinergi dengan pemerintah dan komunitas lintas iman dalam melakukan pencegahan tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis.

6. Pemerintah:
 - 1) Menyosialisasikan bahaya P2GP tanpa alasan medis sesuai dengan kewenangannya, termasuk pada kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA;
 - 2) Membuat kebijakan pencegahan tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis dan aturan perundang-undangan bersama anggota legislatif;
 - 3) Menertibkan tenaga medis agar tidak melakukan malpraktik berupa pelayanan P2GP tanpa alasan medis;
 - 4) Mencabut izin praktik tenaga medis yang melayani P2GP tanpa alasan medis;

7. Ormas dan lembaga-lembaga di masyarakat :
 - 1) Melakukan sosialisasi dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis;
 - 2) Tidak melakukan pembiaran terjadinya P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis;

- 3) Memberikan perlindungan kepada perempuan yang akan menjadi korban P2GP;
 - 4) Bersinergi dengan pemerintah dalam melakukan pencegahan tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis.
8. Lembaga pendidikan:
- 1) Melakukan penelitian terkait P2GP serta perbedaan khitan laki-laki dan perempuan untuk dijadikan landasan dalam peninjauan (*review*) kurikulum dan pengabdian pada masyarakat;
 - 2) Melakukan sosialisasi dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis di lingkungan lembaga pendidikan;
 - 3) Memasukkan dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis dalam kurikulum pendidikan bidang kedokteran, kebidanan, dan keperawatan;
 - 4) Mengintegrasikan pembelajaran tentang dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis pada kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi lintas jenjang.
9. Media:
- 1) Membekali jurnalis dengan informasi tentang dampak buruk dan bahaya P2GP tanpa alasan medis;
 - 2) Tidak membingkai berita perihal P2GP sebagai tindakan yang positif;
 - 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai bahaya P2GP tanpa alasan medis, baik melalui media cetak maupun elektronik;

6. MARĀJI' (REFERENSI)

Al-Qur'ân al-Karîm

'Allam, Syawqi Ibrahim. 2022. *Hukm Khitân al-Inâts wa al-Musâ'adah 'alâ Fi'lih*. Fatwa online yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir (*Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah*) pada tanggal 15 Mei 2022. Detail fatwa dapat ditemukan di link: <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/17380/حکم-ختان-الاناث-والمساعدة-على-فعله-الأستاذ-الدكتور-شوقي-إبراهيم>.

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. 2000. *Sunan Abî Dâwud*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

Abu Surur, Jamal and Ahmad Rajab. 2017. *Khitân al-Inâts bayn al-Malghûth 'Ilmiyyan wa al-Multabas Fiqhiyyah*. Cairo: UNICEF.

Ad-Damardasy, Muhammad. 2017. "Muhammad Syahat al-Jundi: Khitân al-Inâts Harâm Syar'an" *Vetogate*, 3 Nopember 2017 (dapat diakses di: <https://www.vetogate.com/2938969>).

Al-'Azhim Abady, Muhammad Syams al-Haqq. tt. *Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Anshari, Zakaria ibn Muhammad. 1999. *Ghâyah al-Wushûl fî Syarh Lubb al-Ushûl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahîh al-Bukhâri*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1971. *Syifia al-Ghalîl*. Baghdad: Mathaba'ah al-Irsyad.

al-Munazhamah al-'Alamiyyah li-Khirriji al-Azhar. 2014. *Bahtsun Dâr al-Iftâ Hawla Khitân al-Inâts*. Diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2014. Dapat ditemukan di link: https://azhargraduates.org/ar/news_archive1.aspx?id=1083.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2006. "Al-hukm asy-Syar'i fî khitân al-inâts", makalah disampaikan dalam: *Mu'tamar al-'Ulamâ` al-'Alâmi*

- nahwa Hadhr Intihâk Jasad al-Mar'ah*, 22 November 2006, (makalah dapat diakses di: <https://www.al-qaradawi.net/node/4306>).
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib al-Khurasany. 2000. *Sunan an-Nasâ'i*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.
- as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin. 1983. *al-Asybah wa an-Nadhâ'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1990. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. 2012. *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*. Qatar: Qatar Foundation.
- Asy-Syawkani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nayl al-Authâr*. t.t. Beirut: Dar al-Jil.
- Cut Mutia Bunsal, Wawancara, 2022.
- Fadli, Muhammad, (dr.). 2021. *Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan*, makalah disampaikan pada acara Halaqah Pencegahan P2GP – Jaringan KUPI, tanggal 30 Agustus 2021 di Jakarta.
- Fathullah, M. Lutfi. 2006. *Fiqh Khitan Perempuan*. Jakarta: al-Mughni Press.
- Fauziyah, Siti. 2017. "Tradisi Sunat Perempuan di Banten dan Implikasinya terhadap Gender, Seksualitas, dan Kesehatan Reproduksi". *Tsaqôfah; Jurnal Agama dan Budaya*, vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Habsyah, Atas Hendartini, MA. 2009. "Jangan Sampai Organ Vital Perempuan Terpotong", *Swara Rahima*, No. 27. Th. IX April, 2009, h. 16.
- Halaqah Online "Pemotongan & Pelukaan Genitalia Perempuan dalam Tinjauan Teologi dan Budaya", Alimat, 14 November 2020.
- Halaqah Online "Pencegahan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), Jaringan KUPI, 30 Agustus 2021.

- Herdiyani, Rena dan Hegel Terome. 2021. *Studi Medikalisasi Sunat Perempuan di 5 Wilayah (Jabodetabek)*, Jakarta: Kalyanamitra.
- Humas UGM. 2020. “Praktik Sunat Perempuan Masih Banyak Ditemukan di Indonesia”, diakses tanggal 21-11-2022, di alamat: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunat-perempuan-masih-banyak-ditemukan-di-indonesia>.
- Ibn Hajar, Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani. 1997. *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Kairo: Dar ar-Rayyan.
- Ibn Hajar, Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani. *Talkhîs al-Kabîr fî Takhrîj Ahâdits ar-Râfi'i al-Kabîr*. 1998. Madinah al-Munawwarah.
- Ibn Qayyim, Muhammad bin Abu Bakr al-Jauziyah. 1423 H. *I'lâmu al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-Âlamîn*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini. 2000. *Sunan Ibn Mâjah*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.
- Jum'ah, Ali Muhammad Abdul Wahhab. 2009. *Al-Bayân li Mâ Yusyghil al-Adzhan*. Kairo: Al-Muqaththam li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Kalyanamitra. 2021. *Studi Medikalisasi Sunat Perempuan di 5 Wilayah (Jabodetabek)*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Bagi Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan Praktik P2GP* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. *Panduan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Sunat Perempuan bagi Tokoh Agama*. Jakarta: KPPPA.
- Komnas Perempuan dan PSKK UGM. 2017. *Penelitian Kuantitatif P2GP di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2017. *Persimpangan antara Tradisi dan Modernitas: Hasil Penelitian Kualitatif P2GP di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota*, Jakarta: Komnas Perempuan.

- Komnas Perempuan. 2019. *Risalah Kebijakan Pelukaan Genital Perempuan: Praktik Menyakitkan yang Dikekalkan Atas Nama Tradisi*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lestari, Sisca. 2021. *Sunat Perempuan di Kota Bandung*. Hasil riset dipresentasikan dalam Halaqah Rahima tanggal 27 Agustus 2021.
- Malik bin Anas. 2000. *al-Muwaththa'*. 2000. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Maria Ulfah Anshor dan Sarah Hewatt, 2017. "Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan, (P2GP): dalam Persimpangan antara Tradisi dan Modernitas". *Penelitian Metode Gabungan Mengenai Medikalisasi P2GP di 17 Kabupaten di 10 Provinsi di Indonesia antara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Malik bin Anas. 2000. *al-Muwaththa'*. 2000. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Muslim bin al-Hajjaj. 2000. *Shahih Muslim*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Ahmad bin Hanbal. 2000. *Musnad Ahmad*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Maryam B. 2022. "FGD Sunat Perempuan". Diadakan Rahima dalam sebuah *Halaqah P2GP* pada tanggal 26-28 Agustus 2022.
- Muhammad, Husein. 2000. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mulati, Erna, dr. 2019. *Halaqah Pencegahan P2GP*. Semarang: Jaringan KUPI.
- Muslim bin al-Hajjaj. 2000. *Shahih Muslim*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Muwafi, Ahmad Ali. tt. *Khitân al-Inâts Bayna al-Masyrû'iyah wa al-Hadhr: Dirâsah Muqâranah*. Kairo: Kulliyat Dar al-Ulum.
- Nurdiyana, Tutung. 2010. "Sunat Perempuan pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin", *Jurnal Komunitas (2)*, Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

- Risalah Bogor: Musyawarah Ulama Pesantren Mendialogkan Sunat Perempuan di Indonesia, tanggal 3 Mei 2018. Dokumen dapat ditemukan di link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/16PRLW4VK2O0C9mWj_aUIVWhhqKfTzSpt.
- Rofiq, Ainur, et. all., 2019. *Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan, Pemotongan/ Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021. Dapat ditemukan di alamat link: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4220/kemenpppa-dorong-sinergi-pencegahan-p2gp-lintas-sektor-tingkat-nasional>.
- Syaltut, Mahmud. 1995. *al-Fatâwâ: Dirâsatun li Musykilâti al-Muslim al-Mu'âshir fî Hayâtihi al-Yaumiyyah wa al-Âmmah*. Kairo: Dar asy-Syuruq.
- Taushiyah Bogor tentang praktik berbahaya Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP), tanggal 18 November 2021. Dokumen dapat diakses di link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/16PRLW4VK2O0C9mWj_aUIVWhhqKfTzSpt.

7. MULHAQÂT (LAMPIRAN)

- a. Sikap resmi al-Azhar asy-Syarif dalam Korannya sendiri “*Jarîdat Shaut al-Azhâr*” (18 Juli 2020):

لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضراراً كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الاسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلباً على المجتمع بأسره. وبناء عليه قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية الصحيحة و بإجماع أعضائه بمجلسة ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية

صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الأونة الأخيرة. واستقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا ويكون إيقاع العقاب على من يزواله أمرًا جائزًا شرعًا.

- b. Penjelasan detail mengenai fatwa para ulama Mesir mengenai pengharaman khitan perempuan (terbit tanggal 04 Agustus 2014, bisa ditemukan di alamat link berikut: https://azhargraduates.org/ar/news_archive1.aspx?id=1083).

تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان ذلك في التفصيل التالي:

بيان أن القول بتحريم ختان الإناث لا يخالف الشريعة الإسلامية: تقرر عند علماء الحديث أنه لم يصح في ختان الإناث حديث، وأن كل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تقوم بها حجة. يقول الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري الشافعي الحافظ (ت ٣١٩هـ): "ليس في الختان (أي للإناث) خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع". ويقول الإمام أبو عبد البر المالكي في "التمهيد" (٢١/٥٩): "واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال" اهـ.

ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (١٤/١٢٦): "وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة

وكلها ضعيفة معلولة محدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت".
ويقول الحافظ العراقي في "المغني عن الأسفار" (١/١٤٨): "وحدث أم عطية
رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود نحوه من
حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف.

ويقول عن حديث "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء": "رواه أحمد
والبيهقي بإسناد ضعيف". ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار"
(١/١٩١): "ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه
على المطلوب". ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (١/٣٣): "أحاديث
الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء". ويقول الإمام ابن الحاج في
"المدخل" (٣/٣١٠): "واختلف في حقهن: هل يخفضن مطلقا، أو يفرق بين
أهل المشرق وأهل المغرب". وأنظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/٣٤٠)..

وكل هذه النقول تبين أنها عادة وليست عبادة أي أن قضية ختان
الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع
إلى الموروث الطبي والعادات والتقاليد الاجتماعية. ويكفي في
ذلك أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام
عليهن السلام، بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين عليهما السلام.
ومن أشهر الأحاديث المروية في ختان الإناث: حديث أم عطية، وقد رواه
الإمام أبو داود في "سننه" (٤/٤٩٧)، وقال بعد أن رواه: "ليس هو بالقوي،
وقد روي مرسلا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف".
ولفظ أبي داود في رواية هذا الحديث: "لا تنهكي"، وهو مروى أيضا من
طرق أخرى ضعيفة بلفظ: "إذا خفضت - أو إذا خنتت - فلا تنهكي"، رواه
البيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، وابن منده، وابن عساكر في
تاريخ دمشق، وهي وإن كانت كلها روايات ضعيفة إلا أن مجموعها تشير
إلى أن ذلك - على فرض صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لم
يكن أمرا بالختان بوجه من الوجوه ولا حكما بمشروعيته، بل هو أقرب

إلى التوجيه النبوي الكريم الذي يحذر من أضرار ممارسة هذه العادة على الوجه الذي كانت تمارس عليه، والنهي عن التجاوز فيها، وليس فيه أي تعرض للأمر بها أو مشروعيتها من قريب أو بعيد.

وقد جاء الإسلام باحترام حقوق الإنسان كبيرًا وصغيرًا، وأمر بمزيد الاعتناء بالأطفال والإحسان إليهم وخاصة الإناث، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان إليهن حائلاً مانعاً بين المسلم وبين عذاب النار، فقال: "من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النار" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفهم ذلك علماء المسلمين وطبقوه أسى تطبيق حتى كان من قواعدهم التي كونت مناهج تفكيرهم الفقهي: "أن الأنوثة عجز دائم يستوجب الرعاية أبداً"، ولا يسوغ لنا أن نجعل سوء الفهم لهذه الأحاديث الضعيفة مبرراً لخرق القواعد الفقهية الكلية والأصول الشرعية المتفق عليها، وسبباً في التعدي على حرمة الإناث في أمر ثبت ضرره عليهن للعام والخاص.

وأما الحديث الصحيح الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" رواه مسلم، وفي رواية: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"، وفي رواية: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل"، فالمقصود بالختان في الحديث: موضع الختن، والحديث يتكلم عن ما يوجب الغسل من اللقاء بين الزوجين، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغسل يجب إذا تلامس الموضعان اللذان يعرفهما الناس بمصطلح الختان فيهما، سواء أكان الختان حاصلًا فعلاً أم لا، وهذا نوع من الكناية النبوية التي بلغت الغاية في حسن الأدب وسمو العبارة في التعبير عن الأعضاء التي يكفي عنها ويستحي من التصريح بها، فهو مسوق لبيان الحد الذي يجب فيه الغسل من الجنابة، وليس فيه كلام عن حكم الختان، ومن المقرر في علم الأصول كما عبر الإمام الشافعي رضي الله

عنه أن الكلام يجمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده، وحينئذ فلا يصح أن يستدل بنص مسوق في حكم الغسل على حكم ختان الإناث. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، وهذا الحديث خوطبن به مع أزواجهن كما خوطب غيرهن، وحينئذ فلا حجة في الحديث على مشروعية الختان أصلاً. وما يظنه بعض الناس من أن مسألة "ختان الإناث" من المشكلات المستجدة أو أنها أثرت بعد مؤتمر السكان بالقاهرة هو أمر مخالف للواقع، فختان الإناث أثاره الشيخ رضيد رضا في مجلته "المنار" في سنة ١٩٠٤م، حيث سأل الناس حينئذ عن وجوب الختان، فكتب تحت عنوان "وجوب الختان أو سنيته" قال ابن المنذر: ليس في الختان خير يرجع إليه ولا سنة تتبع، واحتج القائلون بأنه سنة بحديث أسامة عند أحمد والبيهقي: "الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء"، ورواية الحجاج بن أرطاة مدلس "أه.

وقبل أن يصدر قرار وزارة الصحة الأول بمنع إجراء عملية الختان للإناث سنة ١٩٥٩م، قبل ذلك بنحو ثمانين سنة، أرسل معالي وزير الصحة المصري في سنة ١٩٥١م إلى فضيلة العلامة الشيخ/ محمود شلتوت، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الشريعة بالأزهر الشريف (والإمام الأكبر فيما بعد) يسأله عن قضية الختان، وخاصة ختان الإناث، فيجيبه بجواب في ٢٨/٥/١٩٥١م ينشره في مجلة الأزهر مجلد ٢٣ عدد المحرم سنة ١٣٧١هـ في صفحة ٢١، ويقول بكل وضوح: "والشريعة تقر مبدأ عاماً، وهو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق لا بطريق الآراء الوقتية التي تلقى تلبية لزعزعة خاصة أو مجارة قوم معينين أن في أمر ما ضرراً صحياً، أو فساداً خلقياً، وجب شرعاً منع ذلك العمل؛ دفعا للضرر أو الفساد، وإلى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس وتعودوه فيه ظل الشريعة الإسلامية وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا، وهو أن ختانها مكرمة، وليس واجبا، ولا سنة.

ثم تكلم كلامًا نفيسًا بعد ذلك، لكن فيما نقلناه قاعدة مهمة تمثل عقل الفقيه المسلم المتمكن من فقهه. وقصة هذا أنه في شهر مايو من ذات السنة أصدر مجلة الدكتور ملحقًا حول ختان البنات، سألت فيه طائفة من الأطباء عن رأيهم وما ينصحون به في هذا الموضوع، فأجمعت كلمتهم على عدم ضرورة ختان البنات، وأشاروا إلى الضرر الذي قد ينجم عن هذه العملية، ولكنهم - والحق يقال - أبدوا ذلك على سبيل الرأي، ومجازاة الحضارة، وليس على سبيل المعلومة الطبية المؤكدة.

وفي مجلة لواء الإسلام في عددها الأول من السنة الخامسة الصادر في شهر يونيو سنة ١٩٥١م (رمضان ١٣٧٠هـ) قامت المجلة بعمل استطلاع لكبار العلماء، فقال الشيخ إبراهيم حمروش عضو جماعة كبار العلماء، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر، وبعد كلام طويل يتعلق بسقف المعارف الشائع، والذي يرتد إلى أمور دنيانا، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: "أنتم أعلم بأمور دنياكم": "يجوز لها ترك الختان، ولكنها في هذه الحالة لم تقم بالمكرمة، فإذا أريد تقرير المنع من ختان المرأة فلا أن يعلم بطريق صحيح أن العلم يثبت أن في ختانها إضرارًا بها حتى يمكن القول بالمنع".

ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، بعد كلام طويل: "الذي يجب على الأطباء أن يوسعوا دائرة الاستقراء، وأن لا يحكموا بأن ختان البنت ضار بناء على حالات فردية، وأن يقارنوا من الوجهة الصحيحة بين من ختنت ومن لم تحتن، فإذا تم هذا الاستقراء وكانت النتيجة أن ختان البنت ضار بها ورأوا منعه فهذا المنع لا يعارض نصاب الدين، ولا إجماعًا لفقهاء المسلمين". ويقول محمد بك البناء، وهو من كبار العلماء أيضًا، بعد كلام طويل أشار فيه إلى اختلاف الأطباء، ثم قال: "إذا اشترك في ذلك عدد أكبر على النحو الذي أبديته - أعني على هيئة مؤتمر - كان البحث أتم وأوفى، والخلاصة أن المسلمين بالخيار من

الناحية الدينية، وأن الأمر متروك للمصلحة، ويجب أن يبحث بحثاً كافياً بمعرفة الخبراء".

وفي المجلد ٢ من مجلة الأزهر، في عددها العاشر الصادر في شوال سنة ١٣٧٢هـ الموافق ١١ يونيو سنة ١٩٥٣م، يتكلم الشيخ محمد عرفة، رئيس تحرير المجلة وعضو هيئة كبار العلماء، فيقول: "والعلم يرى أنه يضر بالحياة الزوجية، ويؤدي إلى انتشار المخدرات بين الرجال، فإذا ثبت كل ذلك فأمره سهل جداً، فليس على من لم تختن من الناس من بأس، ومن اختنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها، وإذا منع في مصر كما منع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاب المغرب فلا بأس. والله الموفق للصواب".

ويتبين من كل ذلك أن المسألة قديمة، يتكلم عنها الشيخ حسنين محمد مخلوف، والشيخ سيد سابق، ويعيدها الشيخ محمود شلتوت في كتاب الفتاوى الصادر سنة ١٩٥٩م، ويذكر فيه مرة ثانية أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه وإلى تحميمه، لا شرعاً ولا خلقاً ولا طباً. ويتبين بذلك أن ختان الإناث عند كبار العلماء متعلق بالمعارف الطبية اليقينية، ولما كانت المعارف الطبية السائدة في العصور الأولى بعضها تقول: إنه لا يضر ولا ينفع، وبعضها تقول: إن فيه شيئاً من النفع، فقد قال الفقهاء الأقدمون بأنه مكرمة، وهم بذلك بنفون صفة الوجوب والسنية عنه، أي أنه ليس صفة تشريعية، بل هو من العادات، وإذا كان من العادات فإن الأمر فيه مردود إلى الخبراء وإلى البيئة وإلى النفع والضرر المحيط به، فيمثل فيه الناس لمعارفتهم العلمية في كل عصر، وعلى هذا المعنى ورد في كتب التراث أنه مكرمة، لا لإقراره، بل لنفي صفة الوجوب وصفة السنية عنها. (كما سبق عن الشيخ محمود شلتوت أيضاً)، وفهم بعض الناس من قول الفقهاء أنها مكرمة أنها مرغوب فيها، والأمر ليس كذلك، بل كلمة (مكرمة) هنا تكلم بها الفقهاء بناءً على المعارف الطبية، وليس بناءً على لاشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يضعفون الحديث الذي وردت فيه هذه

العبارة، ولو استدلوا به لاستدلوا به على أنها ليس من الشريعة في شيء، وهو الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء". المعارف الطبية أخذت في التطور والرصد للحالات والبحث الدقيق حتى استقرت الآن على الضرر البالغ لختان الإناث فيما هو إجماع بين المتخصصين في هذا الشأن، والطبيب الذي يخالف هذا الإجماع تراه غير متخصص فيه، وتراه يتكلم بطريقة غير سليمة، وقد تتعلق بأمر آخر غير العلم من ثقافة سائدة أو ظن أن الشريعة تأمر به فيكون متحرجًا أو غير ذلك.

ومن المعلوم أن الفقهاء ربطوا كلامهم في كثير من المسائل بالأطباء، يقول الإمام الشافعي عندما يتكلم عن كراهة الوضوء بالماء المشمس في كتابه "الأم" (١/٧) ط دار قتيبة: "ولا أكرهه إلا من جهة الطب"، وعندما يتكلمون على مسائل الحيض والنفاس والولادة وغير ذلك من الأمور الصحية المتعلقة بالمرأة فإنهم يرجعون إلى الوجود، ويعنون بالوجود: البحث الطبي، الرصد والتتبع، فقد تقرر أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى الوجود، كما في "فتح المنان شرح الزبد لابن رسلان": ص ٩٧، والمتصفح لكلامهم في هذا المعنى يجده كثيرًا.

والمنهج الإسلامي يرشدنا إلى احترام المعرفة وما من الله به على الإنسان من علم، ويأمرنا باحترام السلف وتعظيمهم. ولكن هذا لا يستلزم الأخذ بكل مسألتهم حتى لو تغير واقعها، بل يقتضى الاهتداء بمناهجهم في فهم الشرع، حيث قاموا بواجبهم على منهج علمي رصين يتفق مع ما أذن الله لهم من معرفة، ومن هنا جاء كلامنا عن أن الختان أربعة أنواع: النوع الأول منه يتم فيه نوع من القطع أي الجرح وليس الاستئصال، والأنواع الأخرى يتم فيها الاستئصال، وأن النوع الأول هو الذي أقره الأطباء قديمًا، والمطلع على كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة ذلك، وأن النوع الأول هو مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلى الفرج دون استئصال هذه

الجلدة: قال الماوردي: "هو قطع جلدة تكون في أعلى افرج: كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها" انتهى من فتح الباري (١٠/٣٤٠).

وقال النووي يف "المجموع" (٣/١٤٨): "هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج". يقول الدكتور محمد هيثم الحياط: "هذه الجلدة في الشترج تسمى (قلفة البظر)، فإذا كانت هي المقصودة بالقطع، وكان النهج منها عنه، فإن قطع أي شيء ولو قليل جدًا من البظر نفسه يدخل في حد تحريم النهك ويأثم فاعله. وواضح أن القطع ليس معناه الاستئصال، كما ذكر الماوردي بحق، فحتى هذه الجلدة لا تستأصل وإنما يقتطع منها. وأنظر إلى قول الإمام النووي (قطع أدنى جزء من الجلدة) فليت شعري أي جراح التجميل هذا الذي يستطيع ذلك؟" اهتفلا عن كتاب "الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث" للدكتور / محمد لطفي الصباغ: ص ١٢. ومن هنا يتبين أن المراد من كلامهم هو القطع ومعناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف "أشمي ولا تنهكي"، وهذا يحتاج إلى جراح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملاساته ضارة على الجسم البشري قطعاً، دون حاجة إليها شرعاً، وأن الأنواع الثلاثة التالية للنوع الأول إنما هي عدوان يستوجب القصاص أو الدية، وأن الدية فيها تصل إلى دية النفس، في حين أن النوع الأول وهو أخفها إنما هو من العادات المرتبطة بالمعارف الطبية.

والمختصون يقررون أن الاقتصار على هذه الدرجة الأولى وعدم تجاوزها إلى ما بعدها من درجات الختان متعسر إن لم يكن متعذراً، أي أنه يكاد يكون غير ممكن، والذي يحصل هو أن ممارس هذه العملية غالباً ما يجوز على الدرجة الثانية وما بعدها، وهذا عدوان محرم بالاتفاق، ومن المقرر في الفقه أن ما لم يمكن ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام أيضاً، وعلى ذلك فإنه يجب منعه وتحريمه أيضاً وقاية

للأنثى مما أجمع الفقهاء على أنه انتهاك لجسدها وهتك لحرمتها، وهي درجات الختان الثلاث التالية للدرجة الأولى، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: "تحريم الحرام حرام"، وقولهم: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وقولهم: "درء المفسد مقدم على جلب المصالح"، فكيف والختان في درجاته كلها قد أجمع الأطباء في هذا العصر على مفسده وأضراره. يقول الدكتور/ محمد سليم العوا، في رسالته "ختان البنات ليس سنة ولا مكرومة": "نص الفقهاء على أن في قطع الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بموضوع الجماع) الدية كاملة، والدية عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقها، وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين (يقع الالتذاذ بالجماع)، فكل فوات لهذا الالتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية، ومنع سببه جائز قطعاً، بل هو أولى من انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله". ويذكر الأطباء أن لهذا الختان مضاعفات سيئة منها:

١. أنه نوع من التشوية الذي يترك آثاراً سيئة على المرأة، كالشعور بالأكتئاب، والتوتر العصبي، والقلق النفسي.
٢. أنه يضعف الناحية الجنسية، وهذا يؤثر في إفساد الحياة الزوجية في المستقبل، ويقيم صعوبة كبرى أمام الأرواء الجنسي للفتاة.
٣. أنه يؤدي إلى التلوث ودخول الجراثيم إلى حوض المرأة، وقد يؤدي إلى مرض الفتاة، وإصابتها بالتهابات، وإنسداد قنوات فالوب، وربما أدى إلى حصول زيف حاد بعد العملية، وقد يؤدي إلى موت الفتاة. وحيث أجمع الأطباء المتخصصون أهل الفن الكبراء وأطبقت كلمتهم على ضرر هذا الفعل فقد وجب القول بمنعه وتحريمه وتجريمه، وليس في ذلك تجريم لسنة تركها لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعي بعضهم. ويزداد التحريم عندما نجد أن هذه العادة تمارس بطريقة مؤذية ضارة، بحيث لو لم يكن ختان الإناث حراماً لوجب تحريمه سداً للذريعة المفضية إلى الأذى والضرر.

ومن كل ذلك يتبين أنه يجب على الأطباء أن يعلنوا الحقائق التي قد توصل إليها بالبحث، وبالمؤتمرات العلمية وبالقرارات التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية، وبما قد أطبق عليها الأطباء المتخصصون في هذا الشأن الآن، بحيث صار إجماعاً بعلم يقيني، كما طالب علماء الشريعة منذ أكثر من نصف قرن، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

ونحن إذ نتبع ما يتقن منه الطب، واستقرت عليه الكلمة، فنحن نتبع هؤلاء العلماء الذين أصلوا لنا الأصول وتركونا على المحجة البيضاء، والحمد لله رب العالمين. ويعترض بعضهم أن بعض علماء الشريعة الكبار - كالشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ عطية صقر رحمهما الله وبارك فيهما وفي علمهما - في سنينا المتأخرة أصدروا الفتاوى بأنه سنة أو واجب، وأقول بكل ثقة: إن ذلك منهم كان استمراراً على المنهج الذي يرفض محض الآراء والتقليد للآخرين، وأن نترك شيئاً من مؤروثنا من أجل هذه الآراء أو الرغبات أو ذلك التقليد، أما لو اطلع أي منهم على تلك الأبحاث المتكاثرة وهذا الاتفاق الذي أطبق عليه فأنهم يرجعون إليه كما علمونا. فالأمر في غاية الوضوح. وإنما كان استمرار هذه العادة عند عدم ظهور ضررها، أما وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب وأجمعوا عليه فمنعها حينئذ واجب؛ حيث أقر ذلك منظمة الصحة العالمية، في تقريرها سنة ٢٠٠٠م، وجرمت هذه العادة الضارة، وهي منظمة محايدة وعلمية موثوق بها، فحدوث الأضرار منها أصبح يقينياً؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار اساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعاً، بل واختلاف تحمل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك.

ولما أحال كبار العلماء الأمر إلى الأطباء، وجزم الأطباء بضررها، أصبح من اللازم القول بتحريمها. فصدر بيان دار الإفتاء المصرية بتحريم الختان، ودار الإفتاء هي المرجعية الرسمية المنوط بها إصدار الفتاوى

الشرعية وبيان الحلال والحرام، كما هونص قرار مجمع البحوث الإسلامية في جلسته السادسة، في دورته الثالثة والأربعين، بتاريخ ٧/١٢/١٤٢٧هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٠٦م، ولا معقب عليها عليها إلا مجمع البحوث الإسلامية - إذا رأي ما يستوجب ذلك - باعتباره المرجعية العليا؛ طبقاً لقانون تنظيم الأزهر رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦١م، ولائحته التنفيذية رقم (٢٥٠) لسنة ١٩٧٥م.

كما صدر بيان مجمع البحوث الإسلامية في شأن مسألة "ختان الإناث"، وذلك بجلسته بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٠٧م، ونصه: "في ضوء الجدل المثار حول ختان الإناث، وموقف الشريعة الإسلامية منه، وفي ضوء ما وقع مؤخراً من وفاة إحدى بناتنا المسلمات نتيجة ممارسة هذه العادة التي ينسبها البعض خطأ إلى تعاليم الإسلام، ناقش مجمع البحوث الإسلامية المسألة من جانبها الفقهي والصحي، وأجمع أعضاؤه على أن التحقيق العلمي يكشف في جلاء عن أنه لا أصل من أصول التشريع الإسلامي أو أحكامه الجزئية يجعل هذه العادة أمراً مطلوباً بأي وجه من وجوه الطلب، وإنما هي عادة ضارة انتشرت واستقرت في عدد قليل من المجتمعات المسلمة، وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات على النحو الذي كشفت عنه الممارسات في الفترة الأخيرة. لذلك وجد المجلس من واجبه أن ينبه إلى هذه الحقيقة العلمية والصحية، وإلى ضرورة تنظيم حملة إرشادية وإعلامية تحذر المواطنين من ممارسة هذه العادة الضارة". اهـ. كما انعقد "مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة" في الأول والثاني من ذي القعدة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠٠٦م في رحاب الأزهر، وألقى فيه عدد من البحوث، وبعد مناقشات السادة العلماء والأطباء والمتخصصين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني في مصر وأوروبا وأفريقيا توصل المؤتمر إلى ما يلي:

١. كرم الله الإنسان فقال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) فحرم الاعتداء عليه أياً كان وضعه الاجتماعي، ذكراً أم أنثى.

٢. ختان الإناث عادة قديمة ظهرت في بعض المجتمعات الإنسانية، ومارسها بعض المسلمين في عدة أقطار تقليدًا لهذه العادة دون استناد إلى نص قرآني أو حديث صحيح يحتاج به.
٣. الختان الذي يمارس الآن يلحق الضرر بالمرأة جسديًا ونفسيًا، ولذا يجب الامتناع عنه امتثالاً لقيمة عليا من قيم الإسلام، وهي عدم إلحاق الضرر بالإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، بل يعد عدوانًا يوجب العقاب.
٤. يناشد المؤتمر المسلمين بأن يكفوا عن هذه العادة؛ تماشيًا مع تعاليم الإسلام التي تحرم إلحاق الأذى بالإنسان بكل صورته وألوانه.
٥. كما يطالبون الهيئات الإقليمية والدولية بذل الجهد لتثقيف الناس وتعليمهم الأسس الصحيحة التي يجب أن يلتزموا بها إزاء المرأة، حتى يقلعوا عن هذه العادة السيئة.
٦. يذكر المؤتمر المؤسسات التعليمية والإعلامية بأن عليهم واجبًا محتمًا نحو بيان ضرر هذه العادة بالشكل الضار، والتركيز على آثارها السيئة في المجتمع، وذلك للإسهام في القضاء على هذه العادة.
٧. يطلب المؤتمر من الهيئات التشريعية سن قانون يجرم ويحرم من يمارس عادة الختان بالشكل الضار فاعلاً كان أو متسبباً فيه.
٨. كما يطلب من الهيئات والمؤسسات الدولية مد يد المساعدة بكافة أشكالها إلى الأقطار التي تمارس فيها هذه العادة كي تعينها على التخلص منها. انتهت توصيات المؤتمر.

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: "والمباحثات يمكن أن تمنع إذا ترتب على استعمالها ضرر؛ بناءً على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ويمنع هذه المباح سدا للذريعة والفساد". ويقول أيضًا: "وبناءً على هذا الأصل المقرر المتفق عليه (يقصد

إبقاء خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوغ يوجب: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا". ويقول الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالته التي ألفها في هذا الشأن: ص (١٤/٨): "الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب"، ثم يقول بعد أن سرد بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: "إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى لم يعد هذا الختان مقبولاً شرعاً بالنسبة للفتاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الأخطار ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر فيما صح عنه أنه "لا ضرر ولا ضرار" وهذا الحديث كلية من كليات هذا الدين الحنيف".

ويذهب الدكتور/ سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنثى أنه لا واجب، ولا سنة، ولا مكرمة؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارة ضرراً محضاً، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت يسببه - على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان - متعة المرأة بقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية، ويقول: "وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الإناث، وأن ما يحتج به من أحاديث الختان كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها". السابق: ص (٣١)، إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم.

وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بجرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقة للكلمة واختلاف لا مبرر له، فيجب أن تطبق كلمة العلماء الشرعيين على تحريم هذه الفعلة؛ حيث إننا نصحنا الفقهاء

بالبحث منذ أكثر من خمسين سنة، فبحثوا وأجمعوا، ونصحناهم بالمؤتمرات فاجتمعوا وقرروا، ونصحناهم بالاتفاق لا عن آراء ولا عن تقليد وإنما عن بحث وتتبع فبحثوا وتتبعوا واتفقوا، فوجب على العلماء حينئذ أن يزيلوا هذه الالتباس، وأن يجتمعوا على كلمة سواء؛ فإن الأمر لا يحتاج إلى كثير اختلاف بعدما تبين الحال، والمطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم. بيان أن القرار بحظر ختان الإناث لا يخالف القانون والدستور: القرار الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان المصرية بتاريخ ٨/٧/١٩٩٦م، بتجريم عمليات ختان الإناث والمعاقبة عليها، وهو القرار رقم ٢٦١ لسنة ١٩٩٦م الذي يقول: "بحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط والتي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى وبناءً على اقتراح الطبيب المعالج". هذا القرار ليس فيه أي انتهاك أو مخالفة للمادة (٦٦) من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون؛ ذلك أن القانون المصري لا يعطي للأطباء الحق في التدخل الجراحي إلا في أربع حالات فقط، وهي: الكشف عن مرض، أو علاج مرض، أو منع ألم قائم أو تخفيفه، أو منع مضاعفات صحية متوقعة. وليس ختان الأنثى حالة من هذه الحالات، بل إنه - بعد أن تأكد ضرره - يشمله عموم جريمة "الجرح"؛ سواء شفي الجرح أو خلف عاهة أو أدى إلى وفاة، كما أن ملامسة عوة الصبي أو الصبية اللذين لم يتجاوزا الثامنة عشر من غيرهما قوة برض أو بغير رضا يعد "هتك عرض" أيضاً، وحينئذ فعلي الرغم من عدم وجود قانون بخصوص ختان الإناث بعينه، إلا أن توصيف هذه الممارسة بأحد الوصفين السابقين يجعل الحملة عليها غير مخالفة للدستور.

يقول المستشار/ صلاح عويس، نائب رئيس محكمة النقض في كتابه (ختان الأنثى في ضوء قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية في القانون المصري) ص(٩): "والمسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الفصل يستوي

فيها الأطباء وغير الأطباء؛ لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضًا، ولا هو سبب لمرض، ولا يسبب لما من أي نوع يستدعي تدخلًا جراحيًا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز الفطري الحساس، على أية صورة كان الختان عليها، لا يعد - في صحيح القانون - علاجًا لمرض، أو كشفًا عن داء، أو تخفيفًا لألم قائم، أو منعًا لألم متوقع؛ مما تباح الجراحة بسببه، فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقعيًا تحت طائلة التحريم". وقد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا لسنة ١٩٩٧م ردا على الدعوى التي أقيمت لإلغاء هذا القرار، وجاء نص الحكم كالتالي:

"قضت المحكمة بتأييد هذا القرار ورفضت طلب إلغائه؛ تأسيسًا على أن ختان الإناث لا يعتبر حقًا شخصيًا مقررًا طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ لم يرد به نص في القرآن الكريم أو حكم قاطع الثبوت أو الدلالة في السنة النبوية، وبذلك بتخضع عملية ختان الإناث لأحكام قانون العقوبات التي تحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية، وأن قرار وزير الصحة لم يخرج عن هذه القاعدة والتزم بها، ومن ثم لا حاجة لصدور قانون بهذه القواعد العامة المقررة. وبهذا لاحكم أصبح من المحظور على الجميع إجراء عملية الختان للإناث، حتى لو ثبت موافقة الأنثى أو أولياء أمورها على ذلك، إلا لو كانت هناك ضرورة طبية لإجراء هذه العملية بناءً على إقرار من مدير قسم أمراض النساء بإحدى المستشفيات، وإلا تعرض المخالفون للعقوبات الجنائية والإدارية التأديبية". وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ما نصه: "وخلصت محكمة القضاء الإداري إلى أن الاستفادة من استعراض الآراء الفقهية المتقدمة أن الشريعة الإسلامية لم تتضمن حكمًا فاصلاً أو نصًا قطعياً يوجب ختان الإناث أو يحظره، ومن ثم فإن الأحكام التي وردت في هذا الشأن كلها ظنية، وحيث إن الطب أيضًا لم يجمع على رأي واحد؛ وإنما ذهب البعض إلى أن ختان الإناث يحقق مصلحة طبية، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه يلحق بهن أشد الأضرار

النفسية والطبية، وحيث إن لولي الأمر أن ينظم الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي قطعي في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد فيها إجماع، وكذلك المسائل الخلافية التي لم يستقر فيها الفقه على رأي واحد، وبصفة عامة جميع المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، وأن مسلك ولي الأمر في ذلك ليس مطلقاً، وإنما يجب أن يكون مستهدفاً بتنظيمه تلك المسائل تحقيق مصلحة عامة للناس أو رفع ضرر عنهم بما لا يناهض نصوصاً شرعية ولا يعاند حكماً قطعياً".

وجاء قرار المحكمة بأنه: لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفاً للدستور، و"طالما أن الختان عمل جراحي خلت أحكام الشريعة الإسلامية من حكم يوجبه، فالأصل الا يتم بغير قصد العلاج؛ فالجراحة أياً كانت طبيعتها وجسامتها التي تجري دون توافر سبب الإباحة بشروطه كاملة تعتبر فعلاً محرماً شرعاً وقانوناً؛ التزاماً بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامة جسمه وتجريم كل فعل لم يبحه المشرع يؤدي إلى المساس بهذه السلامة".

وكان أول نص رسمي صدر في مصر حول ختان الإناث هو القرار الوزاري رقم ٧٤ لعام ١٩٥٩م، ويتضمن هذا القرار في مادته الأولى كشفًا بأسماء لجنة مكونة من ١٥ عضواً من رجال الدين والطب المسلمين، من بينهم وكيل وزارة الصحة مصطفى عبد الخالق، ومفتي الديار المصرية حسن مأمون، ومفتي الديار المصرية سابقاً حسنين محمد مخلوف، وجاء في المادة الثانية أن تلك اللجنة قررت ما يلي:

أنه يرحم بتأثراً على غير الأطباء القيام بعملية الختان، وأن يكون الختان جزئياً لا كلياً، لمن أراد. منع عملية الختان بوحدات وزارة الصحة؛ لأسباب صحية واجتماعية ونفسية. غير مصرح للدايات المرخصات بالقيام بأي عمل جراحي، ومنها ختان الإناث. الختان بالطريقة المتبعة الآن له ضرر صحي ونفسي على الإناث سواء قبل الزواج أو بعده. وأما

ما يزعم من أن هذه الحملة لها منطلقات عدائية للإسلام أو أنها عملية لجهات أجنبية فإن هذا الزعم لا حقيقة له إلا في وهم صاحبه، ولا يجوز للعاقل أن يتهم غيره بالعمالة أو يزايد على وطنيته لمجرد أنه يختلف معه في الرأي، فكيف إذا كان هذا الرأي قد ظهر صوابه للعام والخاص، وهذا من الأساليب المتبذلة التي ننأى بكل منصف عنها، والمنظمة التي رتبت لمؤتمر (حظر انتهاك جسد المرأة) لا صلة لها باليهودية، وقد علمنا الإسلام العدل في الحكم على الناس ونهانا عن المجازفة أو رمي التهم من غير تثبت، وأمرنا بالإنصاف حتى مع خصومنا فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) (المائدة: ٨).

وفي النهاية ننبه إلى أن هذا الدين هو كلمة الله الأخيرة إلى العالمين، وليس هو لنا وحدنا، ولا يقتصر على سقفنا المعرفي وحده، بل خاطب الله به عباده جميعاً، فهو صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الأشخاص وفي كل الأحوال، بل ولكل سقف معرفي يمكن أن يصل إليه البشر، ونحن مأمورون أن نبلغ الإسلام كما أنزله الله تعالى وأراده؛ ظنيًا في ظنية وقطعية في قطعية، وأن نعلم الناس كيف يحبون ربهم سبحانه وتعالى بما أنعم عليهم من صنوف العلم وفنون المعرفة التي تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر، فالإسلام أوسع منا ومن مذاهبنا ومن بيئاتنا ومن تقاليدنا وعاداتنا، وما قد يصلح لنا قد لا يصلح بالضرورة لغيرنا، فكيف وقد أصبح الأمر لا يصلح لنا ولا لغيرنا، فلا يجوز لنا حينئذ أن نكون حجابًا بين الخلق والخالق، ولا أن نجعل أنفسنا سببًا في فتنه الناس عن قبول الإسلام ونشر تعاليمه، ولا أن نقف حجر عثرة أمام العلوم والمعارف التي يأذن بها الله تعالى للبشر حينًا بعد حين، إما بسوء الفهم أو سوء التصرف. والله سبحانه وتعالى أعلم.

- c. Temuan Kasus-kasus Fakta Lapangan di Beberapa Daerah:
- 1). Hasil penelitian Aisyah Tahun 2017 di Desa Rumpa, Kec. Mapilli, Sulawesi Barat, salah satu teknis khitan yang dilakukan adalah klitoris anak ditindih dengan pisau yang sudah dibalut kapas sampai anak menangis. Sedang untuk Desa Pambusuang, Kec. Campalagian diakui oleh *Sanro* khitan bahwa klitoris anak dipotong meskipun sedikit. Fakta yang unik juga ditemukan dari hasil wawancara dengan *Sanro*, bahwa untuk keturunan *sayyid/habib*, maka diperiksa terlebih dahulu klitorisnya. Dengan melihat organ kelamin bayi perempuan, *Sanro* sudah mengetahui gambaran sifat dan karakter bayi tersebut saat dewasa. Jikalau dianggap saat dewasa bayi tersebut genit, maka akan dikerik sedikit ujung klitoris untuk mengurangi nafsunya. Sebaliknya, jika dinilai ketika dewasa anak tersebut menjadi *malaqbi'* (baik), maka khitannya cukup dengan menggoreskan pisau ke ujung klitoris.
 - 2). Pengakuan korban Anggrek (inisial), jaringan KUPI asal Bulukumba menuturkan proses khitan yang menjadikannya trauma dan fobia pada ayam. Teknis khitan yang dialaminya saat usia 6 tahun, yaitu saat dikhitan dia disuruh *ngangkang* dalam kain putih, lalu seekor ayam jantan dimasukkan ke dalam kain putih, ayam jantan itu mematuk klitorisnya (Disampaikan dalam Halaqah Pr-MK KUPI Regional Timur, tanggal 18-20 September 2023 di Makassar).
 - 3). Cut Mutia Bunsal, salah seorang jaringan KUPI dari Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara menceritakan tentang praktik P2GP yang terjadi di daerahnya. Praktik khitan dinamakan mandi lemon. Khitan dilakukan pada anak perempuan dengan usia 1-5 tahun dengan beberapa jenis praktik, ada yang menggunakan pisau kecil dan ada yang hanya dicubit dibalik kain putih. Pendapat dari tokoh

masyarakat mengatakan bahwa ini adalah sebuah tradisi yang sudah sejak lama dilakukan dan setiap anak perempuan diwajibkan atas itu tentu dengan kemampuan finansial dari keluarganya. Karena ada beberapa rangkaian acara setelah mandi lemon, yakni berdoa dan makan bersama. Praktiknya pun hanya dilukai di bagian luar organ kelamin, dan tidak ada pemotongan. Dilakukan oleh orang tua sepuh perempuan tapi bukan biang kampung maupun tenaga kesehatan, dan biasanya dari keluarga yang memberikan bayaran sekitar 100–250 ribu rupiah.